



ORASI PENGUKUHAN PROFESOR RISET BIDANG SOSIOLOGI

REKONSTRUKSI PENDEKATAN DALAM KAJIAN KONFLIK DI ASIA TENGGARA: Kasus Indonesia, Thailand, Filipina, dan Myanmar



**OLEH:
CAHYO PAMUNGKAS**

**LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
JAKARTA, 27 AGUSTUS 2020**

REKONSTRUKSI PENDEKATAN DALAM
KAJIAN KONFLIK DI ASIA TENGGARA:
Kasus Indonesia, Thailand, Filipina, dan Myanmar

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dilarang mereproduksi atau memperbanyak seluruh atau sebagian dari buku ini dalam bentuk atau cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

All Rights Reserved

Buku ini tidak diperjualbelikan.



**ORASI PENGUKUHAN PROFESOR RISET
BIDANG SOSIOLOGI**

**REKONSTRUKSI PENDEKATAN DALAM
KAJIAN KONFLIK DI ASIA TENGGARA:
Kasus Indonesia, Thailand, Filipina,
dan Myanmar**

**OLEH:
CAHYO PAMUNGKAS**

**LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
JAKARTA, 27 AGUSTUS 2020**

Buku ini tidak diperjualbelikan.

© 2020 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Pusat Penelitian Kewilayahan

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Rekonstruksi Pendekatan dalam Kajian Konflik di Asia Tenggara: Kasus Indonesia, Filipina, Thailand, dan Myanmar/Cahyo Pamungkas. Jakarta: LIPI Press, 2020.

ix + 69 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-602-496-144-2 (cetak)
978-602-496-145-9 (e-book)

1. Sosiologi
3. Konflik

2. Perubahan Sosial

303.659

Copy editor : Risma Wahyu H.
Proofreader : Martinus Helmiawan
Penata Isi : Rahma Hilma Taslima
Desainer Sampul : D.E.I.R. Mahelingga

Cetakan : Agustus 2020



Diterbitkan oleh:
LIPI Press, anggota Ikapi
Gedung PDDI LIPI, Lantai 6
Jln. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta 12710
Telp.: (021) 573 3465
e-mail: press@mail.lipi.go.id
website: lipipress.lipi.go.id
 LIPI Press
 @lipi_press

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BIODATA RINGKAS



Cahyo Pamungkas, lahir di Desa Wareng, Butuh, Purworejo, 11 September 1975, adalah anak kelima dari enam bersaudara, dari Bapak H. Suyoto (alm.) dan Ibu Sriyati.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/M Tahun 2019 tanggal 2 Mei 2019, yang bersangkutan diangkat sebagai Peneliti Ahli Utama terhitung mulai 20 Mei 2019.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 173/A/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Pembentukan Majelis Pengukuhan Profesor Riset, yang bersangkutan dapat melakukan pidato Pengukuhan Profesor Riset.

Menamatkan SDN 1 Wareng, Butuh, Purworejo, tahun 1988, SMPN 1 Grabag, Purworejo, tahun 1992, dan SMAN 1 Purworejo, tahun 1994. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta tahun 1999, memperoleh gelar Magister Sains bidang Sosiologi dari Universitas Indonesia tahun 2008, dan gelar Doktor bidang Ilmu Sosial dari Faculteit der Sociaal en Wetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen, Belanda tahun 2015.

Jabatan fungsional peneliti diawali sebagai Peneliti Madya IV/a pada tahun 2009, Peneliti Madya IV/b pada tahun 2015, Peneliti Madya IV/c tahun 2017, dan memperoleh jabatan Peneliti Ahli Utama IV/d pada tahun 2019.

Menghasilkan 90 karya tulis ilmiah (KTI), baik yang ditulis sendiri maupun bersama penulis lain dalam bentuk buku, jurnal, dan prosiding. Sebanyak 34 di antaranya dalam Bahasa Inggris.

Ikut serta dalam pembinaan kader ilmiah, di antaranya sebagai tenaga pengajar pada Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada tahun 2008–2009, pada Universitas Kristen Indonesia (UKI) tahun 2019, pembimbing dan penguji disertasi pada Universitas Indonesia, dan penguji disertasi pada Queensland University, Australia.

Aktif dalam organisasi profesi ilmiah, yaitu sebagai anggota Asia-Pacific Research Association (APRA), International Peace Research Association (IPRA), dan Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo).

Memperoleh tanda penghargaan Satyalencana Karya Satya X Tahun (tahun 2014).

DAFTAR ISI

BIODATA RINGKAS	v
PRAKATA PENGUKUHAN.....	ix
I PENDAHULUAN	1
II PERKEMBANGAN TEORI-TEORI KONFLIK	3
III DINAMIKA KONFLIK DI ASIA TENGGARA	9
3.1 Konflik Horizontal di Asia Tenggara	9
3.2 Konflik Vertikal di Asia Tenggara.....	15
IV REFLEKSI: PELAJARAN UNTUK INDONESIA KE DEPAN ...	23
V KESIMPULAN	26
VI PENUTUP	28
UCAPAN TERIMA KASIH	30
DAFTAR PUSTAKA.....	32
DAFTAR PUBLIKASI ILMIAH.....	42
DAFTAR PUBLIKASI LAINNYA.....	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	58

Buku ini tidak diperjualbelikan.

PRAKATA PENGUKUHAN

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia dan hadirin yang saya hormati.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga dalam kesempatan ini kita dapat berkumpul dan bersama-sama hadir pada acara orasi ilmiah pengukuhan Profesor Riset di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan segala kerendahan hati, izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul:

“REKONSTRUKSI PENDEKATAN DALAM KAJIAN
KONFLIK DI ASIA TENGGARA:
Kasus Indonesia, Thailand, Filipina, dan Myanmar”

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

I. PENDAHULUAN

Naskah orasi ini memuat analisis kajian konflik di Asia Tenggara sebagai pembelajaran untuk Negara Indonesia. Konflik, baik berupa separatisme, kekerasan komunal, maupun konflik laten merupakan fenomena yang dialami oleh negara-negara di Asia Tenggara¹. Separatisme di kawasan ini merupakan bagian dari sejarah integrasi nasional di Indonesia (Aceh dan Papua), Filipina (Mindanao), dan Thailand (Pattani). Saat ini, separatisme di Aceh dan Mindanao telah berakhir dengan perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia pada 2005, serta perjanjian damai antara the Moro Islamic Liberation Front (MILF) dan Pemerintah Filipina pada 2014². Namun, konflik separatisme bersenjata masih berlanjut di Papua, Indonesia dan Pattani, Thailand, yang berimpitan dengan pembelahan identitas kultural.

Konflik komunal berbasis isu etnis dan atau agama di Indonesia (1999–2004) dan persekusi terhadap minoritas etnis Rohingnya (2017) menandai belum meredanya konflik komunal di Asia Tenggara³. Pasca 2006, konflik komunal di Indonesia bergeser menjadi persekusi terhadap kelompok minoritas keagamaan. Sifat dasar konflik juga berubah dari kekerasan menjadi ketegangan komunal atau disebut sebagai konflik laten, seperti berkembangnya intoleransi dan radikalisme sejak 2016. Selain itu, intoleransi juga terjadi dalam media sosial melalui ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong⁴. Meskipun berbagai kajian konflik dan perdamaian telah dilakukan, tetapi konflik komunal, laten, dan separatisme masih kerap muncul di kawasan ini.

Naskah ini merupakan refleksi pengalaman penulis dalam kajian-kajian konflik vertikal dan horizontal di Asia Tenggara da-

lam enam belas tahun terakhir. Penulis berupaya merekonstruksi pendekatan kajian konflik yang melihat sentimen primordial sebagai penyebab utama terjadinya konflik. Argumentasi penulis, konflik berbasis identitas digerakkan oleh sebuah ekosistem, seperti perasaan terancam, religiosentrisme, dan iliterasi media sosial. Oleh karena itu, strategi transformasi konflik dapat dilakukan dengan mengatasi deprivasi dan memperluas batas-batas sosial bersama yang memungkinkan terjadinya dialog dan rekonsiliasi.

Tulisan ini terdiri dari lima bagian. *Pertama*, pendahuluan yang menguraikan makna konflik horizontal dan vertikal serta inovasi tulisan ini. *Kedua*, narasi perkembangan teori dan kajian konflik di Indonesia dan Asia Tenggara. *Ketiga*, uraian penelitian tentang konflik komunal antarkelompok agama; konflik intra-agama; serta konflik vertikal di Asia Tenggara. *Keempat*, refleksi dan pembelajaran dari penyelesaian konflik di Asia Tenggara. *Kelima*, mendeskripsikan kontribusi penelitian penulis terhadap khazanah studi konflik dan perdamaian. *Keenam*, menjelaskan implikasi praktis temuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya.

II. PERKEMBANGAN TEORI-TEORI KONFLIK

Konflik merupakan topik yang banyak dikaji dalam ilmu sosial dan humaniora, baik yang mencakup tipologi, penyebab, pergeseran, maupun kebijakan damai. Sejumlah penelitian yang penulis lakukan berupaya memperbaiki teori penyebab konflik, yaitu *ethnic group conflict theory* (teori konflik kelompok etnis), dan ‘tipologi konflik agama’ serta ‘kebijakan damai’ dalam konteks masyarakat Asia Tenggara.

Terkait dengan tipologi, para sarjana telah merumuskan berbagai kategori konflik. Misalnya, Deutsch mengidentifikasi konflik menjadi kekerasan ataupun laten⁵. Merujuk Merton, konflik laten merupakan konsekuensi yang tidak diinginkan dampaknya terhadap integrasi sosial⁶. Konflik laten dapat bertransformasi menjadi kekerasan apabila terdapat mobilisasi massa oleh elite, *stereotyping* melalui *framing* media, dan tersedianya kesempatan bagi perubahan struktural⁷. Seperti Wessel dan Wimhofer⁸, Van Klinken mengklasifikasi konflik kekerasan di Indonesia berdasarkan sumbernya⁹, yakni konflik separatis, konflik komunal, kerusuhan lokal dan sosial.

Secara konseptual, penyebab konflik dijelaskan oleh teori identitas sosial dan teori konflik realistik. Teori pertama menjelaskan bahwa, baik proses psikologis antarindividu maupun antarkelompok dapat memunculkan permusuhan melalui prasangka¹⁰. Keanggotaan dalam suatu kelompok psikologis merupakan syarat yang mencukupi terjadinya konflik. Teori kedua menyatakan bahwa konflik antara para pihak bertujuan untuk memperebutkan kepentingan material dan atau simbolik. Persaingan cenderung meningkatkan favoritisme kelompok dan menciptakan prasangka serta perselisihan terhadap kelompok lain¹¹. *Ethnic group conflict theory*

mengombinasikan kedua teori ini sebagai berikut¹². Persaingan antarkelompok dapat meningkatkan solidaritas kelompok dan memunculkan permusuhan terhadap kelompok lain. Selain itu, individu memiliki kebutuhan untuk menilai kelompoknya lebih unggul dari kelompok lain. Perasaan terancam yang lahir dari persaingan, cenderung memperkuat mekanisme identifikasi sosial serta mendorong sikap permusuhan terhadap kelompok lain¹³.

Namun, teori ini kurang memberikan perhatian pada proses pembentukan identitas sosial. Brubaker¹⁴ dan Jenkins¹⁵ menegaskan bahwa identitas sosial bukan konstruksi yang bersifat statis. Konflik tidak dapat lepas dari pembentukan batas-batas sosial, yang mencakup relasi antarindividu dalam satu kelompok dan kelompok lain, antarkelompok sosial, dan representasi yang dimiliki bersama¹⁶. Batas tersebut dapat mengalami transformasi dan perubahan batas sosial mendorong aktivasi identitas politik, eksploitasi, diskriminasi, atau kekerasan.

Sejumlah studi mengenai konflik, terutama kekerasan komunal di Indonesia, telah banyak dilakukan, baik oleh peneliti asing maupun dalam negeri. Misalnya, Van Klinken¹⁷ dan Nordholt¹⁸ melakukan penelitian untuk memahami kekerasan dan intoleransi antaretnik di Indonesia pasca-1998. Demikian juga, Bertrand¹⁹, Wilson²⁰, dan Van Klinken⁹ telah melakukan kajian mengenai rentetan konflik antaretnis/agama di Maluku dan Sulawesi. Sementara itu, di dalam negeri, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) merupakan pionir dalam riset konflik pada periode 2004–2007. Misalnya, Nurhasim dkk. mengkaji penyelesaian konflik Aceh²¹. Yanuarti dkk. meneliti penyelesaian konflik Maluku²². Warsilah dan Wardiat menulis strategi penanganan konflik sosial di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah²³. Sementara itu, Tirtosudarmo menganalisis

konflik sebagai konsekuensi dari proyek *nation building* yang gagal²⁴. Semua riset tersebut menjelaskan konflik kekerasan di Indonesia, baik yang bersifat horizontal dan vertikal.

Sementara itu, topik intoleransi berbasiskan agama merupakan arus utama (*mainstream*) dalam kajian konflik di Indonesia pada masa kini. Beberapa studi yang banyak dijadikan referensi ialah Liddle yang menulis *Islamic turn* di Indonesia pada 1996, yakni berkembangnya orientasi keberagamaan yang lebih religius di kalangan kelas menengah menjelang Orde Baru berakhir²⁵. Pada 2000, Hefner menuliskan *civil Islam*, yang mengaitkan adanya proses-proses normatif dalam masyarakat Islam Indonesia akan memperkuat demokrasi dan menjaga kebinekaan²⁶. Pada 2013, Van Bruinessen menulis *conservative turn*, yang memperkuat *Islamic turn* yaitu berkembangnya orientasi keberagamaan Islam yang lebih konservatif²⁷.

Studi terkini mengenai intoleransi di Indonesia dilakukan oleh Menchik²⁸, Menchik dan Trost²⁹, dan Hadiz³⁰. Menchik mengatakan bahwa toleransi di Indonesia lebih berbasis pada hak-hak komunal. Menchik dan Trost menyatakan bahwa muslim Indonesia tidak lebih toleran daripada muslim di negara lain dan krisis intoleransi tersebut bukan merupakan hasil dari demokratisasi. Sementara itu, Hadiz menjelaskan kemunculan Islam politik terkait karakteristik demokrasi Indonesia yang tidak liberal. Kelompok ini muncul sebagai bagian dari menguatnya kapitalisme oligarki yang menggunakan politik identitas. Pembahasan mengenai orientasi politik keagamaan sekarang ini berkelindan dengan perkembangan teknologi informasi. Sebagai contoh, kajian Lim menunjukkan ruang internet Indonesia digunakan untuk persebaran, baik berita bohong maupun ujaran kebencian⁴.

Di sisi lain, kebanyakan studi konflik di Asia Tenggara mengkaji konflik separatisme di Filipina dan Thailand. Futchs

menjelaskan etnis Moro lebih konservatif dalam beragama dan memiliki kepemimpinan yang kuat dalam organisasi dan perjuangan bersenjata sehingga mendapatkan dukungan internasional³¹. Studi Budiwanti menunjukkan gerakan separatis Moro dan Pattani muncul karena diskriminasi, marginalisasi, dan represi politik³². Temuan ini mendukung kajian Che Man yang memaparkan bahwa perjuangan etnis Moro ataupun Pattani dipicu oleh sejarah integrasi dan kolonialisasi internal³³. Sebaliknya, kajian Majul³⁴ dan Pitsuwan³⁵ merekomendasikan politik rekognisi terhadap kedua minoritas ini. Sementara itu, sebagai resolusi konflik, Mcvey menyarankan asimilasi budaya untuk mencegah munculnya nasionalisme etnis³⁶. Namun, pandangan ini ditolak oleh Brown karena asimilasi merupakan salah satu pemicu gerakan separatis³⁷.

Penelitian yang penulis lakukan selama enam belas tahun terakhir berupaya untuk memberikan kontribusi sebagai berikut. *Pertama*, mengisi kesenjangan literatur antara kajian konflik yang memusatkan perhatiannya pada kontestasi elite dan perubahan struktural dengan kajian-kajian konflik yang menekankan pada sikap individu, seperti diskriminasi dan prasangka. Hasil penelitian disertasi penulis⁷ pada periode 2010–2015 menunjukkan bahwa *ethnic group conflict theory* relevan untuk menganalisis relasi antarkelompok etnis dan agama di Ambon dan Yogyakarta. Identitas agama dan etnis mendorong sikap intoleransi karena tingginya perasaan terancam, ketidakpercayaan terhadap kelompok lain, religiosentrisme, dan rendahnya tingkat interaksi sosial

Pada 2018, penulis bersama tim peneliti LIPI, menguji kembali *ethnic group conflict theory* terhadap masyarakat umum di sembilan provinsi³⁸. Hasilnya, identitas agama dan etnis mendorong lahirnya sikap intoleran dan radikal melalui sejumlah

variabel yang merupakan ekosistem konflik. Selain perasaan terancam; ketidakpercayaan (*distrust*), dan religiosentrisme, juga terdapat iliterasi media sosial serta rendahnya pemisahan antara agama dan politik. Perasaan terancam yang sedemikian kuat, meminjam istilah Gurr, berakar pada deprivasi dan perasaan ketidakadilan³⁹. Iliterasi media sosial, kaitannya dengan intoleransi, menandai pergeseran karakteristik konflik di Indonesia dari konflik komunal kepada konflik laten dalam bentuk sikap ‘intoleran yang semakin terbuka.’

Kedua, mengisi kesenjangan literatur dalam studi minoritas keagamaan yang kurang memerhatikan mekanisme rekonsiliasi konflik intra-agama. Dalam kajian relasi Sunni-Syiah di Sampang dan Sunni-Ahmadiyah di Mataram, pada periode 2015–2017, tim LIPI dan penulis mengidentifikasi keyakinan teologis, ikatan sosio-kultural, dan jaringan organisasi sebagai pembentuk ketahanan minoritas keagamaan⁴⁰. Selain itu, rekonsiliasi kultural, merupakan mekanisme resolusi mayoritas-minoritas dalam Islam yang dapat diterima, dan dibandingkan melalui pendekatan hukum⁴¹. Studi ini juga merekomendasikan pencegahan persekusi terhadap minoritas melalui peran aktif pemerintah dan masyarakat sipil sebagai agen perdamaian⁴².

Ketiga, mengisi kesenjangan literatur dalam studi kebijakan perdamaian di Asia Tenggara. Penelitian penulis di 2005–2006 menarasikan proses perdamaian pada masa itu. Kebijakan damai Filipina melalui Autonomus Region for Muslim Mindanao (ARMM) gagal dalam merealisasikan perdamaian karena disertai dengan pendekatan keamanan. Selain itu, kebijakan damai Thailand melalui pembentukan the National Reconciliation Commission (NRC) gagal mengatasi kekerasan politik karena komisi tersebut hanya memiliki kewenangan yang terbatas⁴³. Kedua kasus ini menunjukkan bahwa upaya damai akan gagal jika tidak ditempatkan dalam kerangka politik rekognisi.

Keempat, bersama Tim Kajian Papua LIPI, pada 2008, penulis menyampaikan hasil dalam satu bagian buku *Papua Road Map*. Buku tersebut mengidentifikasi empat akar persoalan konflik Papua, yaitu sejarah integrasi dan identitas politik; kekerasan politik, diskriminasi, dan marginalisasi orang Papua; serta kegagalan pembangunan⁴⁴. Penelitian ini telah menjadi referensi bagi kajian Papua dan didiskusikan oleh para sarjana, seperti King, Elmslie, dan Webb-Gannon⁴⁵, Macleod⁴⁶, Drooglever⁴⁷, dan Anderson⁴⁸. Namun sayangnya, hasil studi tersebut belum menjadi rujukan pemerintah untuk menyelesaikan konflik Papua. Pada 2017, bersama tim kajian Papua LIPI, penulis melakukan penelitian “Updating Papua Road Map”⁴⁹. Hasilnya menyimpulkan bahwa keempat akar persoalan Papua belum terselesaikan dan persoalan lain muncul, seperti depopulasi dan konsolidasi politik Papua merdeka. Untuk memahami permasalahan konsolidasi Papua, penting kiranya mempelajari dinamika konflik di Asia Tenggara, seperti terurai di bagian depan.

III. DINAMIKA KONFLIK DI ASIA TENGGARA

Sebelum 1998, konflik di Asia Tenggara pada umumnya terkait dengan gerakan separatis di Aceh, Papua, Pattani (Thailand Selatan), dan Mindanao (Filipina Selatan). Konflik komunal di Indonesia pada masa tersebut dapat dicegah oleh rezim Orde Baru dengan menggunakan segala cara termasuk pendekatan represif. Pascareformasi 1998 ditandai oleh munculnya berbagai konflik komunal menggunakan identitas agama dan atau etnis. Selain itu, konflik antara negara dan gerakan separatis masih berlanjut di Asia Tenggara. Naskah ini menggunakan terminologi konflik horizontal yang mencakup konflik komunal dan persekusi terhadap minoritas keagamaan, serta intoleransi keagamaan. Sementara itu, terminologi konflik vertikal menjelaskan konflik antara pemerintah dan gerakan separatis.

3.1 Konflik Horizontal di Asia Tenggara

Berdasarkan beberapa kasus konflik komunal di sejumlah daerah, pada periode 1999–2004, penulis mengkaji interaksi sosial sebelum dan sesudah terjadinya kekerasan, serta proses rekonsiliasi pascakonflik di Ambon dan Poso. Menghidupkan kembali interaksi sosial merupakan kata kunci untuk mendekatkan kembali komunitas yang tercerai berai⁵⁰. Akan tetapi, mewujudkan interaksi sosial pascakonflik juga penuh tantangan mengingat adanya kolektif memori kekerasan dan penguatan identitas sosial.

Konflik Poso merupakan contoh untuk melihat pergeseran karakteristik konflik dari kekerasan komunal berbasis agama menjadi kekerasan politik, yakni perlawanan terhadap aparat keamanan sebagai imbas dari penegakan hukum⁵¹. Kekerasan

komunal di daerah ini terjadi pada 1998 sebagai puncak ketegangan komunal yang dieksploitasi oleh para elite lokal untuk memperjuangkan kekuasaan. Desentralisasi dan demokratisasi, setelah jatuhnya rezim Orde Baru, menjadikan elite lokal merasa terancam posisinya dan memanfaatkan momentum ini untuk menegosiasi kepentingannya. Ketika konflik kekerasan berlanjut tanpa terkendali, Laskar Jihad melakukan intervensi dengan terlibat di dalamnya sehingga konflik meluas. Setelah kesepakatan damai ditandatangani oleh kedua belah pihak, konflik tidak serta-merta berhenti karena rekonsiliasi belum menyentuh pada akar rumput. Selain itu, penegakan hukum terhadap kelompok garis keras memunculkan kekerasan karena aparat keamanan menjadi sasaran dalam konflik ini.

Konflik Ambon merupakan kekerasan komunal antarkelompok beragama pada 1999–2004. Kajian sebelumnya mengemukakan bahwa perasaan terancam sejumlah elite lokal menjadi pemicu karena kekuasaan Orde Baru di 1990-an lebih berpihak kepada kelompok agama tertentu. Reformasi politik 1998 menjadikan momen kedua kelompok elite politik menegosiasi kepentingannya dengan memanfaatkan kecemasan sebagai imbas dari perubahan politik nasional. Kontestasi elite ini didukung oleh memori pada masa kolonial ketika Belanda memberi keistimewaan kepada kelompok tertentu untuk menjalankan birokrasi. Kemudian elite kedua kelompok merasa saling terancam posisinya ketika sistem demokratis memungkinkan kekuasaan diperoleh melalui pemilu. Akhirnya, ketegangan komunal antara kedua kelompok terejawantah pada konflik dengan menggunakan simbol agama⁵².

Setelah konflik berakhir pada 2004, didahului oleh Perjanjian Malino I pada 2002, interaksi sosial antara komunitas muslim dan kristiani mengalami perubahan. Sebelum konflik,

kedua pemeluk agama ini tinggal berbaur di Kota Ambon dan anak-anak mereka belajar di sekolah yang sama. Namun setelah konflik, komunitas muslim dan kristiani tinggal di pemukiman yang terpisah, menyerupai situasi di masa kolonial. Mereka memilih tinggal di pemukiman yang seagama atau bersekolah di daerah yang seagama karena merasa tidak terancam, baik secara fisik maupun sosiokultural. Konflik Ambon juga menandai formasi ulang konstelasi politik berdasarkan agama di Maluku. Rekonsiliasi pada tingkat elite politik bermuara pada kesepakatan yang tidak tertulis, yakni politik perimbangan dalam pembagian kekuasaan berdasarkan agama⁵³.

Ambon pascakonflik ditandai dengan proses rekonsiliasi dan segregasi sosial. Keduanya berjalan beriringan dalam proses merajut kembali ikatan-ikatan kultural antara dua kelompok yang berbeda agama untuk menyembuhkan luka dan trauma konflik. Hal tersebut tampak dari seringnya penggunaan seremonial adat *pela* ataupun *gandong* menjelang peristiwa-peristiwa politik. Selain itu, muncul gerakan rekonsiliasi di kalangan anak muda melalui tema budaya yang melampaui identitas agama⁵⁴. Namun, memori kekerasan pada masa lalu tidak menghapus kecurigaan terhadap kelompok lain. Pada generasi muda di sejumlah universitas, gejala intoleransi masih ada. Misalnya, dalam pemilihan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa di salah satu perguruan tinggi, persoalan agama menjadi preferensi utama⁵⁵. Para mahasiswa juga memilih untuk berteman akrab dengan mahasiswa seagama karena diyakini mereka tidak akan menyerang dan dapat dipercaya. Fenomena saling menghindar menunjukkan masih adanya perasaan terancam, rendahnya interaksi sosial, dan tingginya religiosentrisme⁵⁶.

Fenomena menghindari kelompok agama lain juga terjadi di daerah lain, di kota yang selama ini dikenal sebagai jantung

toleransi dan harmoni, yaitu Yogyakarta. Kita memahami apabila fenomena ini terjadi di Ambon karena sejarah relasi antarumat beragama yang disertai dengan konflik dan memori kekerasan. Akan tetapi, ketika fenomena serupa terjadi di Yogyakarta, hal ini diduga adanya perubahan dalam orientasi keagamaan generasi muda menjadi lebih konservatif⁵⁷. Orientasi ini belum tentu mengarah pada intoleransi. Namun, apabila hal ini didukung oleh ekosistem, seperti perasaan terancam, ketidakpercayaan, dan penafsiran keagamaan yang tidak kontekstual, maka hal ini dapat mengarah pada terciptanya jarak sosial.

Meningkatnya konservatisme agama berimpitan dengan meningkatnya tindakan intoleransi, terutama persekusi terhadap minoritas aliran keagamaan, seperti Syiah dan Jemaah Ahmadiyah, dari periode 2004–2012. Hal ini menandai pergeseran karakteristik konflik komunal dari antarkelompok agama menjadi intra-agama. Persekusi terhadap komunitas Ahmadiyah di Lombok terjadi pada 2004 dan 2005 yang mengakibatkan anggota komunitas ini mengungsi di Asrama Transito Mataram. Sementara itu, penyerangan terhadap komunitas Syiah terjadi di Sampang pada 2012. Mereka dipaksa mengungsi ke Sidoarjo. Sampai 2018, Pemerintah belum memberikan kepastian terhadap masa depan pengungsi karena belum selesainya proses rekonsiliasi⁵⁸. Penyebab kedua konflik ini cukup rumit dari perbedaan penafsiran terhadap teks keagamaan, konflik global Sunni-Syiah, kontestasi elite lokal, dan persoalan personal⁵⁹. Demikian juga teologi Syiah yang meyakini keberadaan dua belas imam serta Ahmadiyah yang memercayai bahwa Mirza Ghulam Ahmad merupakan nabi terakhir menjadi penghalang bagi dialog untuk rekonsiliasi⁶⁰.

Rekonsiliasi antara pengungsi Syiah dan Ahmadiyah dengan masyarakat tempat asalnya masih dimungkinkan melalui

pendekatan kultural dan tidak menyentuh perbedaan keyakinan teologis. Rekonsiliasi berdasarkan pendekatan perlindungan HAM sulit diwujudkan karena konteks sosial budaya yang belum mendukung⁶¹. Rekonsiliasi berdasarkan pendekatan teologis juga sulit karena terkait dengan perbedaan keyakinan⁶². Pendekatan kultural ini masih memungkinkan karena relasi kekerabatan antara pengungsi dan saudaranya dari kampung halamannya tetap terjaga⁶³. Selain itu, relokasi pengungsi ke tempat yang baru tidak memberikan jaminan keamanan pada warga pengungsi.

Pada 2017, program inklusi sosial Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia-Nahdlatul Ulama (NU) telah mendorong interaksi yang lebih terbuka antara pengungsi Ahmadiyah dan warga sekitar sehingga mereka mendapatkan hak administrasi kependudukan. Namun di sisi lain, pengungsi diminta menurunkan ekspresi keagamaannya dan dapat berbaur dengan masyarakat setempat. Sementara itu, program tersebut di Sampang belum menunjukkan kemajuan kecuali penerimaan kembali pengungsi Syiah untuk mengunjungi kampung halamannya⁶⁴. Belajar dari bina damai pada konflik Ahmadiyah di Tasikmalaya dan Syiah di Bangil, kami menengarai bahwa untuk mendorong proses rekonsiliasi diperlukan agen perdamaian, baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat⁶⁵. Pada periode 2003–2013 terjadi insiden penyerangan terhadap komunitas Ahmadiyah di Tasikmalaya dan sekolah Syiah di Bangil, sebanyak empat kali. Namun, setelah kekerasan meledak, NU setempat di kedua daerah tersebut memfasilitasi rekonsiliasi antara kelompok penyerang dan korban sehingga konflik dapat dilokalisasi⁶⁴.

Sebagaimana telah disampaikan di bagian awal, karakteristik konflik pasca-2016 mengalami pergeseran dari persekusi terhadap minoritas keagamaan menjadi berkembangnya

fenomena intoleransi, yaitu sikap menolak hak-hak sosial dan politik kelompok lain; dan radikalisme, yakni penafsiran keagamaan yang mengarah pada penggantian sistem politik yang sah⁶⁶. Penggunaan politik identitas dalam Pemilihan Gubernur DKI 2017 dapat menjadi inspirasi gerakan intoleransi keagamaan di daerah lain⁶⁷. Hal ini tampak dari tingginya orientasi yang menolak pemimpin politik dari kelompok agama lain. Di sisi lain, globalisasi ikut berperan mentransmisikan nilai intoleransi dan radikalisme yang bersifat transnasional⁶⁸. Ekosistem politik keagamaan juga mendukung berkembangnya fenomena ini, seperti gerakan untuk mewujudkan NKRI yang bersyariat⁶⁹. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi narasi-narasi positif keindonesiaan dan kebangsaan⁷⁰. Juga, diperlukan strategi kebudayaan dalam mencari titik temu antara nasionalisme dan pandangan keagamaan yang semakin konservatif⁷¹.

Konflik komunal di luar Indonesia terjadi di Myanmar, yakni persekusi terhadap minoritas Rohingnya oleh mayoritas Rakhine pada 2012 dan 2017. Etnis ini tidak diakui sebagai salah satu etnis minoritas oleh Pemerintah Myanmar dan menjadi korban diskriminasi sejak 1962. Kerusuhan antaretnis di Rakhine pada 2012 mengakibatkan ratusan orang Rohingnya meninggal dan ribuan lainnya mengungsi⁷². Kejadian serupa berulang kembali pada 2017 sehingga mereka mengungsi ke Bangladesh, Malaysia, dan Indonesia. Sampai sekarang, etnis Rohingnya menjadi pengungsi tanpa kewarganegaraan.

Minoritas Rohingnya atau disebut Muslim-Rohingnya atau Muslim Arakan, diperkirakan berjumlah sekitar 35% dan Buddha 59% dari 3,8 juta penduduk Rakhine. Kelompok minoritas muslim ini berasal dari berbagai keturunan etnis lain, seperti Burma, Bengali, Arab, dan Persia. Sebelum 1784, Arakan merupakan sebuah negara merdeka dengan penduduknya mayoritas muslim. Setelah Raja Burma, Bowdawpaya, menyerang Arakan, negara

ini dianeksasi oleh Burma sehingga komunitas muslim menjadi minoritas. Dalam perkembangannya, minoritas muslim di Arakan mengonstruksi identitasnya sebagai Rohingnya, berasal dari kata Rohang, nama kuno dari Arakan⁷³.

Meskipun sudah menetap selama ratusan tahun di Arakan, mereka masih dianggap sebagai pendatang gelap dari Bangladesh. Pandangan lain menganggap bahwa mereka adalah bagian dari penduduk asli, orang Arakan. Pada 1958, Presiden pertama Myanmar, Sao Shwe Thaik mendeklarasikan bahwa muslim Arakan ialah bagian dari ras asli Myanmar. Namun, Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 tidak mengakui muslim Arakan sebagai bagian dari warga negara⁷⁴. Pemerintahan junta militer Myanmar pada 1988, mendirikan sejumlah distrik militer baru di Rakhine. Mereka mengambil alih tanah milik etnis Rohingnya tanpa kompensasi. Hal ini menjadikan etnis tersebut tidak memiliki kewarganegaraan dan tanah tempat tinggal⁷⁵.

3.2 Konflik Vertikal di Asia Tenggara

Konflik vertikal dalam naskah ini mencakup gerakan separatis di Mindanao, Pattani, dan Papua. Gerakan separatis paling signifikan di Filipina Selatan meliputi the Moro National Liberation Movement (MNLF) dan Moro Islamic Liberation Movement (MILF). Klaim *immoral and illegal annexation*, asimilasi kebudayaan dan marginalisasi, serta kekerasan politik melatarbelakangi munculnya MNLF⁷⁶. Organisasi ini menandatangani perjanjian damai pada 1996, kemudian bergabung dalam Autonomous Region for Muslim Mindanao (ARMM) pada 1999⁷⁷. Dalam praktiknya, ARMM tidak berjalan sebagaimana harapan MNLF karena hanya bersifat administratif.⁷⁸ Namun, Pemerintah menuduh ARMM telah menyalahgunakan anggaran sehingga pembangunan tidak berjalan. Akhirnya, pimpinan MNLF, Nur Misuari kembali

berperang dan melarikan diri ke Malaysia pada 2001. Pemerintah Malaysia menangkap dan mengembalikan Misuari ke Filipina untuk diajukan ke pengadilan.

MILF lahir dari rahim MNLF dan memisahkan diri pada 1977 karena konflik internal, serta orientasi ideologinya berdasarkan Islam⁷⁹. MILF melanjutkan perjuangan bersenjata sampai perjanjian damai pada 2014. Sebagai tindak lanjut perjanjian tersebut, Pemerintah Filipina pada 2018 mengakomodasi otonomi Bangsamoro melalui *Bangsamoro Organic Law*. Komitmen Pemerintah menetapkan undang-undang ini untuk mengatur otonomi, termasuk penerapan Syariah Islam, sebagai bagian dari *politics of difference dan power sharing*⁴³. Kebijakan ini telah mengakhiri sejarah kekerasan terhadap bangsa Moro sejak abad ke-17. MILF merupakan organisasi yang memiliki kekuatan militer terbesar di Mindanao, tetapi pada akhirnya menurunkan tuntutananya dari merdeka ke otonomi, termasuk penerapan syariat Islam⁸⁰. Pengesahan undang-undang ini menunjukkan mayoritas politik nasional mendukung otonomi bangsa Moro untuk mencegah konflik kekerasan yang berkelanjutan⁸¹. Mereka menyadari bahwa pendekatan represif hanya melahirkan memori kolektif penderitaan yang menghambat proses perdamaian⁸².

Namun, sebagian faksi-faksi di dalam MNLF dan MILF membentuk kelompok-kelompok bersenjata di Sulu dan Mindanao, dan memiliki jaringan dengan organisasi teroris internasional. Misalnya, Abu Sayyaf Group diperkirakan terbentuk pada 1990-an oleh Abdurajak A. Janjalani, merupakan salah satu faksi dalam MNLF yang kecewa ketika MNLF berunding dengan Pemerintah. Mereka beroperasi di Basilan, Sulu, dan Tawi-tawi, dalam bentuk: penculikan untuk meminta tebusan, pembunuhan, pemerasan, dan pengeboman. Sampai 2014, kelompok ini berafiliasi dengan jaringan Al-Qaida di Asia Tenggara, Jemaah Islamiyyah dan bertujuan untuk membentuk

negara Islam di Filipina Selatan. Sejak 2014, kelompok ini berafiliasi dengan *Islamic State in Iraq and Syria* (ISIS), di mana pemimpinnya, Isnilon Hapilon, merupakan amir ISIS di Asia Tenggara⁸³.

Pada 2017, di tengah proses perdamaian antara MILF dan Pemerintah sedang berlangsung, kelompok ini melakukan serangan militer dan menguasai Marawi City selama lima bulan. Meskipun mereka dapat dilumpuhkan secara militer, kelompok ini tetap eksis karena hidup di dalam ekosistem konflik yang berkelanjutan. Pemerintahan pusat dan *Bangsamoro Autonomus Region* memiliki pekerjaan rumah untuk mencegah berkembangnya gerakan ini pada masa depan dengan mengatasi sejumlah persoalan. Misalnya memerangi korupsi, memastikan layanan publik, dan membantu eks kombatan MILF kembali ke kehidupan sipil⁸⁴.

Sementara itu, konflik separatisme Thailand Selatan terjadi di Pattani, Narathiwat, dan Yala yang didominasi oleh etnis Melayu-Pattani. Gerakan separatis muncul sebagai akibat gagalnya proses integrasi politik yang tidak mengakomodasi etnis minoritas. Sejak 1902, kebijakan integrasi tiga wilayah ini menggunakan pendekatan represif, asimilasi secara paksa, dan pembangunan yang eksploitatif⁸⁵. Ketidakpuasan etnis Melayu-Pattani berangkat dari kebijakan Raja Chulalongkorn pada 1902 menghapus otonomi pemerintahan lokal. Kemudian, pada 1921, pemerintah mewajibkan bahasa Thai di sekolah Islam. Keduanya menimbulkan pemberontakan bersenjata pada 1902 dan 1922. Konflik meledak kembali pada 1947 ketika Pemerintah Phibun Songkhram merevitalisasi politik sentralisasi dan nasionalisme Thai. Gerakan separatis bersenjata yang terorganisasi, the Pattani United Liberation Organization (PULO), berdiri pada 1960. Gerakan ini mendapatkan dukungan luas dari masyarakat Melayu-Pattani karena kekecewaan terhadap kebijakan

Pemerintah yang melakukan kontrol terhadap sekolah Islam tradisional. Sejak masa itu, gerakan separatis bersenjata muncul dan hilang bergantung pada tindakan pemerintah Thailand dalam mengakomodasi kepentingan elite Melayu-Pattani⁸⁶.

Konflik di Thailand Selatan pada masa kontemporer bermula dari serangan terhadap sekolah dan gudang senjata pada 2004. Pemerintah Thailand kemudian menetapkan darurat militer untuk tiga wilayah selatan⁸⁵. Setelah itu, kekerasan mulai berlanjut dari pengeboman terhadap polisi dan tentara, serta operasi militer terhadap gerakan separatis yang memakan korban warga sipil. Insiden kekerasan secara terbuka terjadi pada tahun yang sama, yakni penyerangan polisi ke masjid Kruese dan insiden Narathiwat yang mengakibatkan puluhan demonstran meninggal dunia.

Menghadapi gelombang kekerasan yang terus meningkat dan kritik dari aktivis Hak Asasi Manusia, PM Thaksin membentuk the National Reconciliation Commission (NRC) pada 2006. Komisi ini merekomendasikan Pemerintah membentuk UU Rekonsiliasi untuk tiga wilayah di Thailand Selatan. Selain itu, komisi ini mengusulkan agar militer membentuk satuan tugas perdamaian yang terdiri dari polisi, tentara, dan warga sipil. Pemerintah juga disarankan untuk melakukan dialog dengan kelompok militan agar tercapai perdamaian⁷⁸. Sebelum satu pun usulan tersebut diimplementasi, Pemerintahan Thaksin sudah dikudeta oleh militer.

Pada 2013, Pemerintahan Yingluck Shinawatra memulai proses dialog dengan Barisan Revolusi Nasional (BRN) yang dimediasi oleh Malaysia. Namun, proses ini berakhir pada 2014 karena persiapan para pihak yang kurang memadai dan pergolakan politik di Bangkok. Setelah kudeta militer, pada 2015, pemerintahan junta militer memulai proses dialog kembali

dengan gerakan separatis. Atas inisiatif Malaysia, dibentuk Majelis Syura Pattani atau MARA, sebagai payung organisasi bagi sejumlah front pembebasan Melayu-Muslim yang terfragmentasi untuk berdialog dengan Pemerintah Thailand. BRN, kelompok terbesar gerakan separatis dan paling signifikan secara politik, tidak bergabung di dalamnya dan menganggap front-front pembentuk MARA, kecuali the Pattani United Liberation Organization (PULO), tidak memiliki pasukan di lapangan⁸⁷. Sampai sekarang, tidak ada satu kesepakatan pun yang dapat dicapai dan proses dialog mengalami stagnasi karena tidak ada komitmen yang serius dari Pemerintah dan wakil dari gerakan separatis tidak representatif. Data kekerasan menunjukkan pada periode 2009–2016, rata-rata 25 korban meninggal dan 54 orang luka-luka akibat konflik separatis⁸⁸. Sampai sekarang, konflik kekerasan masih terjadi walaupun secara sporadis dalam skala yang lebih kecil.

Selain Thailand Selatan, persoalan separatisme di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia yang belum terselesaikan adalah konflik Papua. Reformasi politik 1998 tidak menjadikan siklus kekerasan politik menjadi berhenti.⁸⁹ Dalam periode 2000–2004 terdapat sejumlah kekerasan politik yang menarik perhatian dunia internasional seperti kasus Wasior (2002) dan Wamena (2003). Kekerasan politik juga muncul sebagai respons Pemerintah atas tuntutan orang Amungme terhadap pengambilan tanah oleh PT Freeport McMoran melalui cara-cara manipulatif di masa Orde Baru⁹⁰. Sejumlah insiden di atas menunjukkan kegagalan Pemerintah dalam membangun perdamaian, dan memperkuat *memoria passionis*.

Pemerintah Indonesia telah mengupayakan penyelesaian konflik Papua dengan mengombinasikan cara *illiberal*, yakni strategi konvensional, seperti menggunakan pendekatan keamanan, ataupun cara liberal, yaitu memberikan otonomi

khusus Papua (Otsus), pemekaran, dan mempercepat pembangunan termasuk infrastruktur⁹¹. Namun, semua upaya tersebut gagal mendorong proses perdamaian dan rekonsiliasi. Berbagai alternatif kebijakan telah diusulkan untuk menyelesaikan konflik Papua, seperti dialog internal Papua dan dialog antara Pemerintah dan rakyat Papua, tetapi tidak direspons oleh Pemerintah⁹².

Untuk merespons aspirasi Papua merdeka, Presiden Habibie berdialog dengan tokoh Papua pada 1999. Namun, di sisi lain, Presiden menetapkan UU No. 45/1999 yang mengatur pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat dan Irian Jaya Tengah. Pemekaran tersebut ditolak secara luas di Irian Jaya karena tidak menjawab tuntutan merdeka. Pemerintahan selanjutnya, Presiden Abdurrahman Wahid mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua dan mengizinkan bendera bintang kejora dikibarkan lebih rendah dari bendera merah putih. Presiden ini dianggap sebagai satu-satunya Presiden yang menyentuh hati orang Papua⁹³.

Pada 2002, Presiden Megawati menetapkan UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, yang proses penyusunannya sudah dilakukan pada masa Presiden Wahid. Namun, pada 2003, Presiden mengeluarkan Inpres No. 1/2003 yang mengatur pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat dan Irian Jaya Tengah. Kebijakan ini menuai protes dan mendorong konflik antarkelompok yang mendukung dan menolak pemekaran, di Timika dan Manokwari⁹⁴. Pemekaran tersebut melanggar UU No. 21/2001 yang mengatur bahwa pemekaran provinsi harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Rakyat Papua (MRP). Di kemudian hari, Mahkamah Konstitusi membatalkan UU No. 45/1999 dan memberikan legitimasi provinsi tersebut dengan UU No. 35/2008.

Pada 2012, Pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono membentuk Unit Percepatan Pembangunan untuk Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) untuk mengoordinasi program pembangunan kedua provinsi. Persoalannya, unit ini tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk mengoordinasi program kementerian di Tanah Papua.⁹⁵ Akhirnya pada awal 2015, unit ini dibubarkan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi. Walaupun Pemerintah telah berupaya mempercepat pembangunan melalui UP4B, tetapi jumlah kekerasan politik dari 2012 sampai 2014 meningkat sehingga tidak meningkatkan kepercayaan rakyat Papua kepada Pemerintah⁹⁶. Presiden Jokowi sampai dengan periode pertama selesai, telah membawa harapan baru untuk menyelesaikan konflik Papua secara damai. Namun, beliau belum berhasil mewujudkan janjinya untuk menghentikan kekerasan politik. Presiden Jokowi dalam periode pertamanya meninggalkan warisan jalan trans-Papua, tetapi jalan tersebut belum mampu menjadikan orang Papua sebagai penerima manfaat yang signifikan⁹¹.

LIPI telah mengusulkan empat strategi Papua damai untuk menyelesaikan akar persoalan konflik Papua melalui jalan damai⁴⁴. Internasionalisasi persoalan Papua yang disertai dengan konsolidasi gerakan politik kaum muda dan diaspora Papua tidak dapat dihadapi dengan pendekatan represif, tetapi dengan merangkul mereka melalui dialog⁹⁷. Mempertahankan integrasi Papua tidak dapat lagi dilakukan dengan pendekatan keamanan dan mengeksploitasi sumber daya alam atas nama pembangunan. Kehadiran Indonesia di Papua lebih dibutuhkan untuk memperkuat daya hidup orang Papua agar dapat melanjutkan kehidupannya bersama habitat ekologis dan kebudayaannya⁹⁸. Semua bentuk represi hanya akan menambah luka orang Papua dan menjauhkan dari identitas keindonesiaan. Kita harus memberikan kesempatan orang Papua untuk menjadi bagian

dari Indonesia dengan cara mereka. Hal ini dapat tercapai hanya melalui dialog yang bermartabat untuk melindungi hak-hak dasar orang Papua. Otsus Papua merupakan hasil dari negosiasi antara Pemerintah dan sejumlah elite politik Papua. Tidak adanya negosiasi dengan elemen-elemen rakyat Papua yang lebih luas menyebabkan Otsus tidak mendapat dukungan secara luas. Ia merepresentasikan konsesi unilateral Jakarta, serta tidak berkaitan dengan strategi mengatasi gerakan separatis⁹⁹.

Dalam kondisi Tanah Papua yang didera kerusakan akibat protes terhadap rasisme, penulis masih memiliki optimisme karena masih terdapat gerakan perdamaian, yakni Jaringan Damai Papua (JDP). Kelompok ini terdiri atas etnis Papua dan pendatang yang bergerak memfasilitasi dialog antarkelompok etnis Papua, baik antara masyarakat dan Pemerintah Papua, maupun antara masyarakat Papua dan Pemerintah Pusat¹⁰⁰.

IV. REFLEKSI: PELAJARAN UNTUK INDONESIA KE DEPAN

Dalam satu dekade ke depan, Indonesia akan menghadapi dua persoalan terbesar, yakni intoleransi keagamaan dan konflik separatisme Papua. Oleh karena itu, kita dapat belajar dari dinamika konflik pada masa lalu ataupun strategi penyelesaian konflik di negara lain.

Dinamika konflik horizontal memberikan pelajaran bahwa perasaan terancam dan religiosentrisme merupakan temuan penting. Keduanya merupakan bagian dari ekosistem yang menggerakkan identitas agama atau etnis untuk berperan dalam sikap intoleran, diskriminatif, dan tindak kekerasan terhadap kelompok lain. Perasaan terancam merupakan temuan yang paling signifikan. Ia lahir sebagai respons terhadap deprivasi relatif, kesenjangan secara ekonomi, politik, dan budaya antara kelompoknya dan kelompok lain. Perasaan terancam merupakan reaksi dari kondisi marginalisasi yang dialami oleh suatu kelompok. Sementara itu, religiosentrisme adalah sikap berprasangka buruk terhadap kelompok agama lain dan penafsiran keagamaan yang tertutup. Keduanya diperparah dengan politik identitas dan iliterasi media sosial sehingga menumbuhkembangkan sikap intoleran terhadap kelompok agama atau etnis lain.

Intoleransi dan radikalisme, serta penggunaan politik identitas yang semakin terbuka telah mengancam prinsip kebinekaan, semangat kebangsaan, dan etika kewarganegaraan. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap penolakan sebagian masyarakat terhadap pemimpin yang berbeda agama. Hal ini diperburuk dengan berkembangnya gerakan khilafah Islamiyah dan Indonesia Bersyariah, yang menjadikan fenomena intoleransi ini menemui konteks politiknya. Meminjam istilah Geertz, negara bangsa

perlu menempatkan sentimen keagamaan ini di dalam posisi yang tidak bertentangan dengan nasion.

Pengalaman Myanmar, Thailand, dan Filipina dalam menyelesaikan konflik di negaranya memberikan pelajaran berharga dalam proses pembangunan kebangsaan. Persekusi terhadap etnis Rohingnya di Rakhine, Myanmar, yang disertai dengan pengusiran dan eksklusi kewarganegaraan merupakan contoh kegagalan dalam memberikan perlindungan terhadap warga negara dan kelompok minoritas. Dalam konteks Indonesia, kita memiliki persoalan yang hampir sama, yakni persekusi terhadap kelompok minoritas aliran keagamaan sehingga mereka hidup di pengungsian. Oleh karena itu, kebijakan inklusi sosial dan rekonsiliasi kultural merupakan strategi yang tepat untuk mengelola konflik komunal dan konflik intra-agama.

Sementara itu, Thailand dalam perkembangannya, telah mencoba menyelesaikan konflik separatisme melalui pendekatan terhadap elite lokal dan dialog dengan gerakan separatis. Namun sampai sekarang, siklus kekerasan masih terjadi karena pendekatan dialog hanya dilakukan dengan kelompok-kelompok yang secara politik 'tidak signifikan'. Sebaliknya, kelompok terbesar dan signifikan, yakni Barisan Revolusi Nasional (BRN) dikecualikan dalam dialog. Negosiasi dengan elite lokal melalui pemberian bantuan ekonomi hanya dapat mengendalikan sekelompok elite, tetapi tidak menyentuh persoalan eksploitasi sumber daya, asimilasi budaya, dan represi politik berkelanjutan.

Filipina adalah contoh pelajaran yang berharga dalam menyelesaikan konflik separatis. Negara ini melakukan pendekatan dialog dan negosiasi dengan gerakan separatis di Mindanao yang besar dan signifikan (MNLF dan MILF). Hasil perundingan damai 1996 dengan MNLF, gagal karena Pemerintah tidak berkomitmen untuk melaksanakannya. Baru pada

perjanjian damai 2014 dengan MILF, Pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan kesepakatan yang dicapai dan berhasil mengakhiri konflik separatisme yang sudah berlangsung selama 44 tahun. Strategi resolusi konflik Mindanao mengikuti pola perundingan damai antara Indonesia dan Aceh pada 2005. Hasilnya, konflik separatisme di kedua daerah tersebut dapat ditransformasikan ke dalam dialog dan rekonsiliasi, yang ditindaklanjuti dengan politik rekognisi terhadap entitas etnis Aceh dan bangsa Moro.

Baik konflik komunal, intoleransi, maupun separatisme akan selalu membayangi perjalanan bangsa ini karena kita tidak pernah secara serius mendiskusikan nasion, proses menjadi orang Indonesia, atau keindonesiaan dalam konteks sosiologis. Pengarusutamaan label 'NKRI' adalah contoh betapa kita, secara sadar atau tidak sadar selalu gandrung akan *state*, yang identik dengan homogenitas, hierarki politik, dan kontrol terhadap masyarakat. Sudah saatnya kita menjadikan nasion Indonesia, meminjam istilah Anderson, sebagai proyek bersama, baik masa sekarang maupun masa depan. Nasion adalah proyek yang tidak pernah selesai. Namun, rezim politik tertentu dapat bekerja sama dengan kekuatan imperialis untuk menghentikan proyek ini dengan menggunakan politik identitas.

V. KESIMPULAN

Sejarah konflik sosial di Indonesia pascareformasi 1998 bersifat dinamis yang ditandai oleh pergeseran karakteristik konflik. Perubahan politik pada 1998 mendorong kontestasi elite lokal menegosiasi kepentingannya dengan memobilisasi sentimen primordial. Hal ini menjadi konteks kekerasan komunal antarkelompok agama atau etnis pada periode 1999–2004. Kemudian, setelah 2004, muncul persekusi terhadap minoritas aliran keagamaan. Setelah 2016, karakteristik konflik bergeser kepada konflik laten, yaitu semakin terbukanya sikap intoleran terhadap kelompok agama lain. Di samping itu, terdapat karakteristik konflik yang relatif tidak berubah yakni konflik separatis di Tanah Papua.

Pendekatan yang memandang bahwa identitas etnis dan agama merupakan sumber utama dari intoleransi, radikalisme, dan konflik sosial perlu direkonstruksi kembali. Simbol-simbol identitas agama dan atau etnisitas sering kali digunakan untuk memobilisasi massa disertai dengan narasi permusuhan. Penelitian Penulis menunjukkan bahwa sentimen primordial tidak secara langsung mendorong sikap intoleran atau tindakan kekerasan. Namun, identitas ini dapat digerakkan oleh ekosistem konflik seperti telah dijelaskan di muka. Oleh karena itu, pendekatan dalam kajian konflik perlu melihat dan memusatkan perhatiannya pada ekosistem konflik termasuk relasi dominasi dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik yang mengakibatkan deprivasi relatif.

Konflik komunal berbasis sentimen keagamaan dapat diselesaikan melalui pendekatan rekonsiliasi berbasis kultural daripada pendekatan legal. Sebagai contohnya, konflik Ambon dan Poso dapat diakhiri dengan Perjanjian Malino I dan II, dito-

pang pula oleh proses rekonsiliasi pada masyarakat akar rumput. Salah satu bentuknya ialah merevitalisasi mekanisme kultural yang terbukti efektif pada masa lalu untuk mendekatkan kedua komunitas berbeda agama. Dalam kasus konflik intra-agama, rekonsiliasi kultural pada akar rumput terjadi melalui program inklusi sosial yang melibatkan pihak yang berkonflik untuk berinteraksi dengan masyarakat di sekitarnya.

Pendekatan keamanan yang represif disertai dengan eksploitasi pembangunan ekonomi bukanlah jawaban untuk mengatasi separatisme. Mereka tidak bertujuan untuk memisahkan diri, tetapi mengklaim kembali kemerdekaan yang dulu ‘dianggap ada’ dan sekarang dirampas oleh negara ‘kolonial’. Dialog untuk rekonsiliasi dengan kelompok separatis merupakan strategi yang bermartabat untuk menjaga integrasi. Sebaliknya, kelompok separatis dalam dialog akan menurunkan tuntutan dari merdeka menjadi otonomi yang mampu melindungi hak-hak dasar masyarakatnya.

VI. PENUTUP

Rekonstruksi pendekatan dalam kajian konflik yang ditawarkan oleh naskah ini pertama-tama lebih menekankan pada perspektif paradigma untuk mengelola ekosistem konflik. Dengan demikian, konflik dapat ditransformasikan menjadi fungsi dari integrasi sosial. Fenomena intoleransi dan radikalisme, misalnya, tidak dapat dijawab dengan pendekatan negara yang represif. Akan tetapi, dapat dimoderasi dengan dialog, kohesi sosial, serta sistem distribusi yang berkeadilan. Intoleransi dan radikalisme perlu dimoderasi melalui strategi pengelolaan distribusi sumber daya dan kekuasaan agar mencapai semua lapisan masyarakat. Di sisi lain, rekonstruksi sosial-keagamaan dapat dilakukan dengan mentransformasikan penafsiran agama yang tertutup melalui dialog dalam ruang-ruang publik yang bebas. Sebaliknya, prasangka terhadap kelompok lain dapat dikurangi melalui peningkatan kohesi sosial yang memungkinkan perluasan batas-batas sosial bersama antarkelompok identitas yang berbeda.

Pada tingkat kebijakan, Pemerintah dan organisasi-organisasi masyarakat sipil dapat mendorong kampanye membangun narasi positif keindonesiaan. Misalnya memberikan ruang publik keagamaan pada ormas keagamaan moderat dan melakukan dialog dengan komunitas keagamaan ‘konservatif’. Pembubaran ormas radikal tidak akan efektif jika tidak disertai dengan pengembalian kesadaran ideologis para pengikutnya. Selain itu, untuk mencegah berkembangnya ujaran kebencian dan berita palsu di media sosial, Pemerintah selayaknya melakukan penegakan hukum yang lebih serius dengan tetap menjaga kebebasan berekspresi.

Kebijakan rekonsiliasi berbasis kultural yang sudah dilakukan dalam konflik intra-agama adalah program inklusi sosial bagi pengungsi minoritas aliran keagamaan. Di sejumlah daerah, program tersebut dapat dilanjutkan dan didukung oleh pemerintah dan lembaga donor. Program inklusi sosial selayaknya diperluas untuk mencegah berkembangnya konflik komunal yang melibatkan relasi mayoritas dan minoritas karena program ini mendorong interaksi yang berimplikasi pada pembangunan ikatan kewargaan. Kebijakan ini berbeda dengan Myanmar yang mencabut hak kewarganegaraan dan melakukan persekusi terhadap etnis Rohingnya sehingga mereka hidup di pengungsian tanpa kewarganegaraan.

Namun, rekonsiliasi kultural tidak dapat diterapkan untuk kasus kekerasan politik seperti yang terjadi di Tanah Papua. Rekonsiliasi tersebut harus didasarkan atas kebijakan negara melalui proses yang terdiri dari pengakuan kebenaran, permintaan maaf, penegakan keadilan, pengampunan, pemaafan, rehabilitasi, dan kompensasi. Untuk mencapai rekonsiliasi tersebut, pemerintah harus terlebih dahulu melakukan dialog dengan gerakan politik Papua merdeka. Belajar dari kegagalan dialog damai antara Pemerintah Thailand dan MARA, wakil dari Papua harus berasal dari gerakan politik yang paling signifikan. Selain itu, belajar dari keberhasilan perundingan damai antara Pemerintah Filipina dan MILF, dialog Jakarta-Papua harus didahului dengan dialog internal antarkelompok masyarakat sipil di Tanah Papua dan penghentian segala bentuk tindakan kekerasan dari para pihak yang berkonflik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi-Mu, ya Allah, saya panjatkan untuk mensyukuri pencapaian akademik ini. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang berjasa dalam proses ini. *Pertama*, saya ucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo; Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Dr. Laksana Tri Handoko, M.Sc.; Ketua Majelis Pengukuhan Profesor Riset, Prof. Dr. Ir. Bambang Subiyanto, M.Agr.; Sekretaris Majelis Pengukuhan, Prof. Dr. Ir. Gadis Sri Haryani; Tim Penelaah Naskah Orasi ilmiah, Prof. Dr. Heny Warsilah, M.A., Prof. Dr. Yekti Maunati, M.A., dan Prof. Dr. Muhammad Adlin Sila sehingga naskah ini layak diorasikan; serta Panitia Pelaksana Pengukuhan yang telah menyelenggarakan pengukuhan profesor riset ini.

Terima kasih juga kepada Deputi Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan, Prof. Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, M.A.; Sekretaris Utama LIPI, Rr. Nur Tri Aries Suestiningtyas, M.A.; Kepala Pusat Penelitian Kewilayahan, Dr. Ganewati Wuryandari, M.A.; Kepala BOSDM LIPI, Dr. Heru Santoso, M.App.Sc.

Kedua, kepada para guru, Prof. Dr. Taufik Abdullah, Dr. Riwanto Tirtosudarmo, Dr. Muridan S. Widjojo (alm.), Pater Dr. Neles K. Tebay (alm.), Dr. Haneman Samuel, Prof. Dr. Frans Huskens (alm.), Dr. Huub de Jonge, Dr. Carl Sterkens, Prof. Dr. Frans Wijzen, Prof. Dr. Erwiza Erman, Prof. Dr. Muhammad Hisyam, Prof. Dr. Endang Turmudi, Prof. Dr. Mochtar Pabotinggi, Dr. Mohammad Sobary, Dr. Thung Ju Lan, Drs. Soewarsono, M.A., dan Drs. Imam Ahmad, M.A.

Ketiga, para sahabat yang terus mendukung kehidupan dan jejak karier akademik, Dr. Adriana Elisabeth, Dr. Rosita Dewi,

Aisah Putri Budiatri, Septi Satriani, Yoga Prayoga, Wahyudi, Ibnu Nadzir, Sari Seftiani dan kawan-kawan Tim Sumbu Pendek, Ibu Latifah Anum Siregar dan kawan-kawan Jaringan Papua Damai, Bapak Hikmat Budiman dan kawan-kawan Populi Center, Fadjar Nursahid dan kawan-kawan LP3ES Jakarta, Dr. Nyoman Sudira dan kawan-kawan Forum Akademisi Papua Damai.

Saya berterima kasih kepada rekan Pusat Penelitian Kewilayahan: Dr. Erni Budiwanti, Dr. Fadjar I. Thufail, Gusnelly, Rucianawati, Lamijo, Rita Pawestri, Dr. Ahmad Helmy Fuady, Dr. Paulus R. Yuniarto, Erlita Tantri, Upik Sarjiyati, Betty Rositasari, Saiful Hakam, Amin Mudzakkir, Amorisa Wiratri, Wabilia Husna, dan seluruh kawan-kawan yang tidak bisa disebut satu per satu. Juga tidak lupa pada teman-teman staf administrasi yang lama: Ibu Dini Saptari (almh.), Ibu Made Subaliati, Ambari, Yudho Utomo, Christina Effendi, dan Caroline Telaumbanua; maupun yang baru: Hendyarto Putroutomo, Edy Susanto dkk.

Keempat, saya berterima kasih kepada keluarga saya, Bapak Suyoto (alm.) dan Ibu Sriyati, atas doa dan kasih sayang mereka sehingga saya dapat bertahan hidup sampai sekarang. Juga pada keluarga: Kakanda Cahyo Waspodo, Maria Susana Cahyo Kawedar, dan Cahyo Raharjo serta adinda Cahyo Ambaringtyas yang tiada henti-hentinya berdoa untuk keberhasilan saya.

Terima kasih kepada rekan LIPI Press yang membantu pengeditan dan penerbitan naskah orasi ini. Kepada para hadirin yang dengan saksama bersedia mengikuti acara pengukuhan ini saya menyampaikan banyak terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

1. Geertz C. The integrative revolution: Primordial sentiments and civil politics in the New State. Dalam: The interpretation of cultures. New York: Basic Books; 1973: 105–107.
2. International Crisis Group. The Philippines: Renewing prospects for peace in Mindanao Asia. Report N°281. 6 July. Brussels: ICG; 2016.
3. Tadjoeiddin MZ. Anatomy of violence in the context of transition: The case of Indonesia 1990-2001. Working Paper 02-01/E, Jakarta: UNSFIR (United Nations Support Facility for Indonesian Recovery); 2001.
4. Lim M. Freedom to hate: Social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*. Taylor & Francis 2017; 49(3): 411–427
5. Deutsch M. The resolution conflict: Constructive and destructive process. New Haven and London: Yale University Press; 1973. 14.
6. Merton RK. Social theory and social structure (enlarged ed.). New York: The Free Press; 1968. 117.
7. **Pamungkas C.** Intergroup contact avoidance in Indonesia [Disertasi]. [Belanda]: Radboud University Nijmegen; 2015. 3
8. Wessel I, Wimhofer G. Violence in Indonesia. Hamburg: Abera; 2001: 20–22.
9. Van Klinken G. Communal violence and democratization in Indonesia: Small town wars. Routledge; 2007. 3.
10. Tajfel H, Turner J. An integrative theory of intergroup conflict. Dalam: Austin WG, Worchel S, editor. The social psychology of intergroup relations. Monterey, CA: Brooks/Cole; 1986. 149–178.
11. Gijssberts M, Hagendoorn L, Scheepers P, editor. Nationalism and exclusion of migrants: Cross national comparisons. Burlington, USA: ASHAGATE; 2004. 8.

12. Scheepers P, Gijsberts M, Coenders M. Ethnic exclusionism in European countries, public opposition to civil rights for legal migrants as a respond to perceived ethnic threat. *European Sociological Review* 2002; 18(1): 17–34.
13. Coenders M, Lubbers M, Scheepers P. From a distance: Avoidance of social contacts with immigrants in the European Union. Dalam: Poppe E, Verkuyten M, editor. *Culture and conflict: Liber amicorum for Louk Hagendoorn*. Amsterdam: Aksant Academic Publishers; 2007. 217–244.
14. Brubaker R, Loveman M, Stamatov P. Ethnicity as cognition. *Theory and Society* 2004; 33: 1–34.
15. Jenkins R. *Social identity* (1st ed.). London and New York: Routledge; 1996. 69.
16. Tilly C. *Identities boundaries and social ties*. London: Paradigm Publishers; 2005. 134.
17. Van Klinken G. Indonesia's new ethnic elites. *Indonesia: In search of transition*; 2002. 67–105.
18. Nordholt HS, Van Klinken G. *Renegotiating boundaries: local politics in post-Suharto Indonesia*. Brill; 2007.
19. Bertrand J. *Nationalism and ethnic conflict in Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press; 2004.
20. Wilson C. *Ethno-religious violence in Indonesia, from soil to God*. New York: Routledge; 2008.
21. Nurhasim M, Patji AR, Alihar F, Lamijo. *Konflik Aceh, analisis atas sebab-sebab konflik, aktor konflik, kepentingan dan upaya penyelesaian*. Jakarta: Proyek Pengembangan Riset Unggulan LIPI; 2003.
22. Yanuarti S, Yusuf, Marieta J, Triatmoko MW. *Konflik di Maluku Tengah, penyebab, karakteristik, dan penyelesaian jangka panjang*. Jakarta: Proyek Pengembangan Riset Unggulan LIPI; 2003.

23. Warsilah H, Wardiat D. Akar permasalahan dan strategi penanganan konflik sosial di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Dalam: Smith G, Bouvier H, editor. *Communal conflicts in Kalimantan, perspectives from the LIPI-CNRS Conflict Studies Programme*. Jakarta: PDII LIPI & LASEMA; 2006. 1–76.
24. Tirtosudarmo R. Demography and conflict: The failure of Indonesia's nation building project. Dalam: Anwar DF, Bouvier H, Smith G, Tol R, editor. *Violent internal conflict in Asia Pacific: Histories, political economies, and policies*. Jakarta: YOI, LASEMA-CNRS, KITLV Jakarta; 2005.
25. Liddle W. The Islamic turn in Indonesia: A political explanation. *The Journal of Asian Studies* 1996; 55(3): 613–634.
26. Hefner RW. *Civil Islam: Islam and democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press; 2000.
27. Van Bruinessen M, editor. *Contemporary developments in Indonesian Islam: Explaining the "conservative turn"*. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies; 2013.
28. Menchik J. *Islam and democracy in Indonesia: Tolerance without liberalism*. Cambridge University Press; 2016.
29. Menchik J, Trost K. Indonesian Muslims in comparative perspective. Dalam: Hefner RW, editor. *Routledge handbook of contemporary Indonesia*. New York: Routledge; 2018.
30. Hadiz V. Behind Indonesia's illiberal turn [Internet]. Newmandala; 20 Oktober 2017. [Diakses 30 November 2018]. Diunduh dari <http://www.newmandala.org/indonesia-illiberal/>
31. Futchs MJ. *Comparative study a Thai and Filipino Moslem* [Master Thesis]. [Ann Arbor, Michigan: Fuchts]: the American University, University Microfilms; 1970. 10.
32. Budiwanti E, **Pamungkas C**, Lamijo. *Separatisme, multikulturalisme dan pembangunan negara bangsa di Filipina*. Jakarta: PS DR LIPI; 2003.

33. Che Man WK. Muslim separatism the Moros of Southern Philippines and the Malay of Southern Thailand. Manila: Ateneo de Manila University Press; 1988. 113.
34. Majul CA. The contemporary Muslim movement in the Philippines. Barkeley: Mizan Press; 1985.
35. Pitsuwan S. Islam and Malay nationalism: A case study of The Malay-Muslims of Southern Thailand. Bangkok: Thai Khadi Research Institute, Thammasat University; 1983.
36. Mcvey R. Separatism and the paradoxes of the nation state in perspective. Dalam: Lim Jo Jock, editor. Armed separatism in Southeast Asia. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS); 1983. 15.
37. Brown D. The State and ethnic politics in Southeast Asia. London and New-York: Routledge; 1994. 3.
38. **Pamungkas C.** Membangun narasi positif ke-Indonesia-an dan kebangsaan. Jakarta: Puslit Masyarakat dan Budaya LIPI. Laporan penelitian PN Sumbu Pendek; 2018. Tidak dipublikasikan.
39. Gurr TR. Why men rebel. New York: Routledge; 2015.
40. **Pamungkas C,** editor. Mereka yang terusir: Studi tentang ketahanan sosial pengungsi Ahmadiyah dan Syiah di Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia; 2017.
41. **Pamungkas C,** editor. Mematahkan kebuntuan: Inisiatif rekonsiliasi dari dua konflik (Syiah Sampang dan Jamaah Ahmadiyah Indonesia, Lombok). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia; 2018.
42. **Pamungkas C,** editor. Meredam permusuhan, memadamkan dendam: Pelajaran bina damai dan ketahanan minoritas keagamaan dari Tasikmalaya dan Bangil. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia; 2019.
43. **Pamungkas C.** Menelusuri kebijakan perdamaian di Asia Tenggara: Studi kasus di Filipina Selatan dan Thailand Selatan. Jakarta: Universal Press; 2010.

44. Widjojo MS, Elisabeth A, Al Rahab A, **Pamungkas C**, Dewi R. Papua road map: Negotiating the past, improving the present, and securing the future. Jakarta: Yayasan Pusaka Obor Indonesia; 2008.
45. King P, Elmslie J, Webb-Gannon C. Comprehending West Papua. Sydney: Centre for Peace and Conflict Studies, University of Sydney; 2011.
46. MacLeod J. Pathways to dialogue in Papua: diplomacy, armed struggle or nonviolent resistance? Dalam: Bartkowski M, editor. Rediscovering nonviolent history: Civil resistance beneath eulogized violence. Colorado: Boulder, CO, Lynne Rienner Publishers; 2011.
47. Drooglever P. An act of free choice: decolonization, and the right to self-determination, London: One World Publication; 2010.
48. Anderson B. Papua's insecurity: State failure in the Indonesian periphery. Honolulu, Hawaii: East-West Center; 2015.
49. Pamungkas C, Rusdiyarti SR. Updating Papua road map: Proses perdamaian, politik kaum muda, dan diaspora Papua. Jakarta: LIPI & Yayasan Pusaka Obor Indonesia; 2017.
50. Budiwanti E, **Pamungkas C**, editor. Interaksi sosial antaretnis di daerah konflik horisontal. Jakarta: Balitbang Departemen Kehakiman dan HAM RI; 2004.
51. **Pamungkas C**. Membaca dinamika konflik Poso: Dari kekerasan komunal ke kekerasan politik. Masyarakat Indonesia, Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia 2006; XXXII(2): 55–76.
52. **Pamungkas C**. Interaksi sosial antarumat beragama di Maluku: Sebelum dan sesudah konflik sosial. Masyarakat Indonesia, Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia 2005; XXX(1): 91–101
53. **Pamungkas C**. Agama, etnisitas, dan perubahan politik di Maluku: Refleksi teoretik dan historis. Masyarakat Indonesia 2014; 40(1): 37–56.

54. **Pamungkas C.** Ethnic conflict theory, religiosity, and cultural bond: Approaches combined to resolve religious intolerance in Ambon. *Jurnal Harmoni* 2015; 14(1): 9–25.
55. **Pamungkas C.** Social contexts of exclusionary reactions: Study on Muslim and Christian relation in the city of Ambon. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 2015; 5(1): 49–78.
56. **Pamungkas C.** Ringkasan disertasi: Intergroup contact avoidance in Indonesia. *Masyarakat Indonesia* 2016; XLIII(2): 249–266.
57. **Pamungkas C.** Social changes in Yogyakarta. *Jurnal Humaniora* 2015; 27(2): 141–155.
58. **Pamungkas C.** Pengungsi dan ketahanan sosial. Dalam: C Pamungkas, editor. Mereka yang terusir: Studi tentang ketahanan sosial pengungsi Ahmadiyah dan Syiah di Indonesia. Jakarta: Yayasan Pusaka Obor Indonesia; 2017. 1–34.
59. **Pamungkas C.** Social resilience of minority group: Study on Syiah refugees in Sidoarjo and Ahmadiyah refugees in Mataram. *Jurnal Ulumuna* 2016; 19(2): 251–278.
60. **Pamungkas C.** Konsep ketahanan sosial: Implikasi teoretik. Dalam: **Pamungkas C.**, editor. Mereka yang terusir: Studi tentang ketahanan sosial pengungsi Ahmadiyah dan Syiah di Indonesia. Jakarta: Yayasan Pusaka Obor Indonesia; 2017. 235–256.
61. **Pamungkas C.** Mencari bentuk rekonsiliasi intra-agama: Analisis terhadap pengungsi Syiah Sampang dan Ahmadiyah Mataram. *Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 2018; 13(1): 113–147.
62. **Pamungkas C.** Rekonsiliasi berbasis komunal: Catatan refleksi. Dalam: **Pamungkas C.**, editor. Mematahkan kebuntuan: Inisiatif rekonsiliasi dari dua konflik (Syiah Sampang dan Jamaah Ahmadiyah Indonesia Lombok). Jakarta: Yayasan Pusaka Obor Indonesia; 2018: 227–254.

63. **Pamungkas C.** Kapan mereka kembali: ketahanan sosial dan kemungkinan rekonsiliasi bagi pengungsi JAI di Lombok dan Pengungsi Syiah di Sidoarjo. Dalam: **Pamungkas C**, editor. Mematahkan kebuntuan: Inisiatif rekonsiliasi dari dua konflik (Syiah Sampang dan Jamaah Ahmadiyah Indonesia, Lombok). Jakarta: Yayasan Pusaka Obor Indonesia; 2018:1–34.
64. **Pamungkas C.** Relasi damai dalam Syiah Sampang dan Ahmadiyah Mataram, mungkinkah?: Tawaran konseptual. Dalam: **Pamungkas C**, editor. Meredam permusuhan, memadamkan dendam: Pelajaran bina damai dan ketahanan minoritas keagamaan dari Tasikmalaya dan Bangil. Jakarta: Yayasan Pusaka Obor Indonesia; 2019. 1–34.
65. **Pamungkas C.** Konsep ketahanan sosial untuk minoritas agama. Dalam: **Pamungkas C**, editor. Meredam permusuhan, memadamkan dendam: Pelajaran bina damai dan ketahanan minoritas keagamaan dari Tasikmalaya dan Bangil. Jakarta: Yayasan Pusaka Obor Indonesia; 2019. 153–174.
66. **Pamungkas C**, editor. Intoleransi dan radikalisme di Indonesia. Jakarta: Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya LIPI. Laporan penelitian PN Sumbu Pendek; 2018. Tidak dipublikasikan.
67. **Pamungkas C**, Hakam S. Belt road initiative and the making of Southeast Asian identity. *Suvannabhumi* 2019; 11(2): 59–83.
68. **Pamungkas C.** Globalisasi dan global village dalam diskursus: Catatan penutup. Dalam: Hisyam M, **Pamungkas C**, editor. Indonesia, Globalisasi, dan Global Village. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia; 2016. 611–627.
69. **Pamungkas C.** Gone but not forgotten: The transformation of the idea of Islamic state through traditional religious authorities. *Masyarakat, A Sociology Journal* 2018; 23(2): 187–211.
70. **Pamungkas C**, editor. Kertas kerja membangun narasi positif ke-Indonesia-an. Jakarta: PMB-LIPI; 2018.
71. **Pamungkas C**, Saidi A. Mendefinisikan ulang multikulturalisme dan nasionalisme di Indonesia: Kajian isu-isu frontier. Jakarta: PMB LIPI. Laporan penelitian; 2017. Tidak dipublikasikan.

72. Rahman MZ, Anasura J, Chantamith B, Hossain S, Al-Amin M. Rohingya crisis: Identity of Rohingya Muslim in Myanmar. *International Research Journal of Social Sciences* 2018; 7(12): 12–16.
73. Grundy-Warr C, Wong E. Sanctuary under a plastic sheet–The unresolved problem of Rohingya refugees. *IBRU Boundary and Security Bulletin* 1997; 5(3): 79–91.
74. Mohajan H. History of Rakhine State and the origin of the Rohingya Muslims. *Indonesian Journal of Southeast Asian Studies* 2018; 2(1): 19–24.
75. Milton AH, Rahman M, Hussain S, Jindal C, Choudhury S, Akter S, Ferdousi S, Mouly TA, Hall J, Efrid JT. Trapped in statelessness: Rohingya refugees in Bangladesh. *International journal of environmental research and public health* 2017; 14(8): 942.
76. **Pamungkas C.** Perkembangan gerakan separatisme bangsa Moro. Dalam: Budiwanti E, editor. *Separatisme, multikulturalisme, dan pembentukan negara bangsa di Filipina*. Jakarta: PSDR LIPI; 2003: 49–90.
77. **Pamungkas C.** Sejarah perjuangan bangsa Moro 1968–2003. *Jurnal Tantular* 2005; 3: 78–91.
78. **Pamungkas C.** The effectiveness of the Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM) in coping with the separatism and the role of National Reconciliation Commission of Thailand in peace building. Dalam: *Are we up to the challenge?: Current crisis and the Asian intellectual community. The Work of the 2005/2006 API Fellows*. Bangkok: The Nippon Foundation; 2008. 185–195.
79. Budiwanti E, **Pamungkas C.** Pendahuluan. Dalam: Budiwanti E, editor. *Separatisme, multikulturalisme, dan pembentukan negara bangsa di Filipina*. Jakarta: PSDR LIPI; 2003. 1–16.
80. **Pamungkas C.** The Moro Islamic Liberation Front (MILF) and all out war in Mindanao. *Tarbawi* 2006; 136(Tahun ke 8): 58–59.
81. **Pamungkas C.** Bringing back the minority through regional autonomy: Case study of West Papua and Mindanao. *Jurnal Komunitas* 2017; 2(2): 121–145.

82. Budiwanti E, **Pamungkas C.** Kesimpulan dan rekomendasi. Dalam: Budiwanti E, editor. Separatisme, multikulturalisme dan pembangunan negara bangsa di Filipina. Jakarta: PSDR LIPI; 2003. 121–126.
83. Singh B, Singh J. From “bandit” to “amir”—The rise of the Abu Sayyaf Group as a jihadi organization in the Philippines. *Asian Politics & Policy* 2019; 11(3): 399–416.
84. International Crisis Group (ICG). Crisis Group Report No. 301, The Philippines: Militancy and the new Bangsamoro. Brussel: ICG, 27 Juni; 2019.
85. **Pamungkas C.** The Malay-Muslim and Thailand administration. *Jurnal Hermenia* 2005; 4(1): 1–26.
86. **Pamungkas C.** The state policies towards southern border provinces. Dalam: Budiwanti E, editor. Separatism, multiculturalism, and nation statebuilding in Thailand. Jakarta: PSDR LIPI; 2003. 61–109.
87. International Crisis Group (ICG). Crisis Group Report No. 304, Southern Thailand’s peace dialogue: Giving substance to form, 21 Januari. Brussel: ICG; 2020.
88. Abuza Z. Violence in Thailand’s deep south [Internet]. New-mandala.org; 17 Agustus 2016 [diakses 29 Februari 2020]. Diunduh dari: <https://www.newmandala.org/violence-thailands-deep-south/>
89. **Pamungkas C.** Menggugat proyek pembangunan perdamaian di Papua Barat setelah reformasi 1998. Dalam: Ahraf A, editor. Oase gagasan Papua bermartabat. Jakarta: Penerbit Imparsial; 2017. 284–305.
90. **Pamungkas C.** PT Freeport Indonesia: Sejarah dan dampaknya terhadap suku Amungme dan Komoro. *Socia jurnal ilmu-ilmu sosial* 2009; 6(Mei): 53–70.
91. **Pamungkas C.** Can infrastructure based development bring peace in Papua. Dalam: Konferensi International Peace Research Association (IPRA); 11–12 November 2018; Ahmedabad-India. Tidak dipublikasikan.

92. Elisabeth A, **Pamungkas C**, Budiatri AP, Satriani S. Dialog nasional membangun Papua damai (kertas kerja). Jakarta: Tim Kajian Papua-Pusat Penelitian Politik LIPI; 2016.
93. **Pamungkas C**. Pemerintah dan rekonsiliasi. Dalam: Adriana E, editor. Trust building dan rekonsiliasi di Papua. Jakarta: LIPI; 2006: 49–90.
94. **Pamungkas C**. Konflik elit lokal dalam pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat. Masyarakat Indonesia, Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia (LIPI) 2004; XXX(1): 15–40.
95. Pohan MH, **Pamungkas C**, Jumadi. Kajian exit strategy dan mekanisme transisi pasca berakhirnya efektivitas Peraturan Presiden No 66/2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam melaksanakan Peraturan Presiden No. 65/2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Jakarta: UP4B; 2014. Tidak dipublikasikan.
96. **Pamungkas C**. Efektivitas pembangunan sosial ekonomi dan kebijakan afirmatif dalam resolusi konflik Papua. Noken Jurnal Ilmiah Bahasa, Sastra & Sosial-Budaya 2014; 3: 324–340.
97. **Pamungkas C**. Internasionalisasi konflik Papua: Menelusuri perjalanan ULMWP dan diaspora Papua. Dalam: Rusdiyarti SR, **Pamungkas C**, editor. Updating Papua road map: Proses perdamaian, politik kaum muda dan diaspora Papua. Jakarta: Yayasan Pusaka Obor Indonesia; 2017. 137–196.
98. **Pamungkas C**. Building social resilience on Asmat people: Social and cultural perspective. Kapata Arkeologi 2018; 14(1): 111–122.
99. McGibbon R. Secessionist challenges in Aceh and Papua: Is special autonomy the solution? Washington: East-West Center Washington; 2004.
100. **Pamungkas C**. The campaign of Papua Peace Network for Papua peace land. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2017; 21(2): 147–159.

DAFTAR PUBLIKASI ILMIAH

Buku Internasional

1. Sterkens CJA, Kanas AM, Subagya YT, **Pamungkas C**, Thijs PE, Scheepers PLH. Ethno-religious conflict in Indonesia 2012: Documentation on surveys on ethno-religious identity and latent group conflict. Amsterdam: Pallas Publications-Amsterdam University Press; 2014.

Bagian dari Buku Internasional:

2. **Pamungkas C**. Can infrastructure based development in Papua bring peace? Dalam: Spring ÚO, Brauch HG, editor. Decolonising conflicts, security, peace, gender, environment and development in the Anthropocene. Springer & IPRA; 2020.

Buku Nasional

3. Husain M, Prihatna AA, Ujyati TP, **Pamungkas C**. Menjaring aspirasi rakyat: Catatan dari dialog anggota DPR dengan rakyat. Jakarta: CESDA-LP3ES; 2003.
4. Elisabeth A, **Pamungkas C**, Widjojo MS, Rucianawati, Blegur S. Agenda dan potensi damai di Papua. Jakarta: LIPI; 2005.
5. Elisabeth A, Al-Rahab A, **Pamungkas C**, **Widjojo MS**. Trust building dan rekonsiliasi di Papua. Jakarta: LIPI; 2006.
6. Wijoyo MSW, Elisabeth A, **Pamungkas C**. Al-Rahab A, Dewi R. Papua road map: Negotiating the past, improving the present, and securing the future. Jakarta: LIPI & Yayasan Pusaka Obor Indonesia; 2008.
7. **Pamungkas C**. Menelusuri kebijakan perdamaian di Asia Tenggara. Jakarta: Universal Press; 2010.
8. **Pamungkas C**, Ratnasari H, Teguh. Moderasi beragama Islam berbasis kearifan lokal di Papua Barat. Jakarta: Pengurus Pusat MUI; 2018.

9. Seftiani S, **Pamungkas C**, Muflikh IN, Alamsyah P. Wajah pluralitas yang tergerus: Intoleransi dan radikalisme di sembilan daerah. Yogyakarta: Kanisius; 2020.

Bagian dari Buku Nasional

10. **Pamungkas C**. Perkembangan gerakan separatisme Bangsa Moro. Dalam: Budiwanti E, editor. Separatisme, multikulturalisme, dan pembentukan negara bangsa di Filipina. Jakarta: PSDR LIPI; 2003. 49–90.
11. Budiwanti E, **Pamungkas C**. Pendahuluan. Dalam: Budiwanti E, editor. Separatisme, multikulturalisme, dan pembentukan negara bangsa di Filipina. Jakarta: PSDR LIPI; 2003. 1–16.
12. Budiwanti E, **Pamungkas C**. Kesimpulan dan rekomendasi. Dalam: Budiwanti E, editor. Separatisme, multikulturalisme, dan pembentukan negara bangsa di Filipina. Jakarta: PSDR LIPI; 2003. 121–126.
13. **Pamungkas C**. The state policies towards southern border provinces. Dalam: Budiwanti E, editor. Separatism, multiculturalism, and nation state building in Thailand. Jakarta: PSDR LIPI; 2004. 61–109.
14. **Pamungkas C**. Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum untuk PLTA. Dalam: Adi W, editor. Perhitungan ekonomi daerah aliran sungai (DAS) Citarum. Jakarta: LIPI Riset Kompetitif Pengembangan Iptek; 2004. 183–220.
15. **Pamungkas C**. Economic reform: Impact and prospect. Dalam: Tantri E, editor. The impact of market economy on the development of communism. Jakarta: PSDR LIPI; 2005. 133–156.
16. **Pamungkas C**, Tantri E. Introduction. Dalam: Tantri E, editor. The impact of market economy on the development of communism. Jakarta: PSDR LIPI; 2005. 1–24.
17. **Pamungkas C**. Transnational corporations, civil society and state in the Philippines. Dalam: Fuady AH, editor. The impact of transnational corporation on the Philippines development. Jakarta: PSDR LIPI; 2006. 189–228.

18. **Pamungkas C.** The relation between state, civil society and entrepreneurs in China. Dalam: Setyaningsih RP, editor. Impact of the market economy on the formation of social classes in the People's Republic of China: The emergence of the entrepreneurs. Jakarta: PSDR LIPI; 2006. 113–148.
19. **Pamungkas C.** The impact of political changes on foreign direct investment in the People's Republic of China. Dalam: Setyaningsih RP, editor. The Impact of Economic Reform on Foreign Direct Investment in China. Jakarta: PSDR LIPI; 2007. 159–201.
20. **Pamungkas C.** Ancaman keamanan nonkonvensional di perbatasan Indonesia-Timor Leste: Persoalan kewenangan, pengungsi dan aktivitas ekonomi ilegal. Dalam: Wuryandari G, editor. Isu keamanan antara Indonesia dan Timor Leste. Jakarta: LIPI Press; 2007. 153–204.
21. **Pamungkas C.** Searching the perspective of Asian Studies through Sociology of Knowledge: a postcolonial standpoint. Dalam: Fuadi AH, editor. Social issues in areas studies: Theory and cases. Jakarta: Research Centre for Regional Resources-Indonesia Institute of Sciences; 2009. 6–35.
22. **Pamungkas C.** The labour movement and pro-democracy movement in Korea: Historical analysis of state-civil interrelationship and the civil society. Dalam: Sarjiati U, editor. Industrial relation under the Employment Permit System in South Korea. Jakarta: LIPI Press; 2010. 23–60.
23. **Pamungkas C.** Merumuskan kembali peranan lembaga produksi ilmu pengetahuan modern: Analisis terhadap pemikiran Delanty. Dalam: Nasiwan, editor. Menuju indigenisasi ilmu sosial Indonesia. Yogyakarta: FISTRANS Institute; 2012. 3–27.
24. **Pamungkas C.** Globalisasi dan global village dalam diskursus: Catatan penutup. Dalam: Hisyam M, **Pamungkas C**, editor. Indonesia, globalisasi, dan global village. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia; 2016. 611–627.

25. **Pamungkas C.** Sumbangan John Haba terhadap kajian perbatasan. Dalam: Siburian R, editor. Beta orang Kupang: Mengetahui John Haba lewat para sahabat. Jakarta: Yayasan Pusaka Obor Indonesia; 2016. 261–278.
26. **Pamungkas, C.** Peran studi kawasan dalam pengembangan ilmu sosial dan pemecahan masalah kemasyarakatan. Dalam: N Kleden N, Abdullah T, editor. Paradigma ilmu pengetahuan dan penelitian ilmu-ilmu sosial dan humaniora di Indonesia. Jakarta: LIPI Press; 2017. 607–640.
27. **Pamungkas C.** Internasionalisasi konflik Papua: Menelusuri perjalanan ULMWP dan diaspora Papua. Dalam: Rusdiyarti SR, **Pamungkas C**, editor. Updating Papua Road Map: Proses perdamaian, politik kaum muda dan diaspora Papua. Jakarta: OBOR; 2017. 137–196.
28. **Pamungkas C.** Pengungsi dan ketahanan sosial. Dalam: **Pamungkas C**, editor. Mereka yang terusir: Studi tentang ketahanan sosial pengungsi Ahmadiyah dan Syiah di Indonesia. Jakarta: Yayasan Pusaka Obor Indonesia; 2017. 1–34.
29. **Pamungkas C.** Konsep ketahanan sosial: Implikasi teoretik. Dalam: **Pamungkas C**, editor. Mereka yang terusir: Studi tentang ketahanan sosial pengungsi Ahmadiyah dan Syiah di Indonesia. Jakarta: yayasan Pusaka Obor Indonesia; 2017. 235–256.
30. **Pamungkas C.** Menggugat proyek pembangunan perdamaian di Papua Barat setelah reformasi 1998. Dalam: Ahraf A, editor. Oase gagasan Papua bermartabat. Jakarta: Penerbit Imparsial; 2017. 284–305.
31. **Pamungkas C.** Pengelolaan perbatasan dalam perspektif kebudayaan. Dalam: Wuryandari G, editor. Reformulasi kebijakan pengelolaan perbatasan di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2018. 326–387.
32. **Pamungkas C.** Wisatawan lansia Tiongkok: Para pelintas global. Dalam: Tantri E, editor. Globalisasi dan masyarakat menua Tiongkok: Pariwisata dan potensi Lansia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia; 2018. 125–158.

33. **Pamungkas C.** Rekonsiliasi berbasis komunal: Catatan refleksi. Dalam: **Pamungkas C**, editor. Mematahkan kebuntuan: Inisiatif rekonsiliasi dari dua konflik (Syiah Sampang dan Jamaah Ahmadiyah Indonesia, Lombok). Jakarta: Yayasan Pusaka Obor Indonesia; 2018. 1–34.
34. **Pamungkas C.** Kapan mereka kembali: ketahanan sosial dan kemungkinan rekonsiliasi bagi pengungsi JAI di Lombok dan Pengungsi Syiah di Sidoarjo. Dalam: **Pamungkas C**, editor. Mematahkan kebuntuan: Inisiatif rekonsiliasi dari dua konflik (Syiah Sampang dan Jamaah Ahmadiyah Indonesia, Lombok). Jakarta: Yayasan Pusaka Obor Indonesia; 2018: 1–34.
35. **Pamungkas C.** Konsep ketahanan sosial untuk minoritas agama. Dalam: **Pamungkas C**, editor. Meredam permusuhan, memadamkan dendam: Pelajaran bina damai dan ketahanan minoritas keagamaan dari Tasikmalaya dan Bangil. Jakarta: Yayasan Pusaka Obor Indonesia; 2019. 153–174.
36. **Pamungkas C.** Relasi damai dalam Syiah Sampang dan Ahmadiyah Mataram, mungkin?: Tawaran konseptual. Dalam: **Pamungkas C**, editor. Meredam permusuhan, memadamkan dendam: Pelajaran bina damai dan ketahanan minoritas keagamaan dari Tasikmalaya dan Bangil. Jakarta: Yayasan Pusaka Obor Indonesia; 2019. 1–34.
37. **Pamungkas C.** Dari sosolot ke diaspora. Dalam: Budiman H, editor. Ke timur haluan menuju: Studi pendahuluan tentang integrasi sosial, jalur perdagangan, adat, dan pemuda di Kepulauan Maluku. Jakarta: Yayasan Pusaka Obor Indonesia; 2019. 73–132.
38. **Pamungkas C.** Membaca kekerasan antarkelompok masyarakat di tiga kota. Dalam: Muttaqin Z, editor. Pemuda di lingkaran konflik kekerasan. Jakarta: LP3ES, UNDEF & FNUD; 2019. vii–xv.
39. **Pamungkas C.** Pembangunan infrastruktur dan persoalannya di Papua Barat: Studi kasus Kabupaten Tambora. Dalam: **Pamungkas C**, editor. Masalah pendidikan dan kesehatan di Papua: Kebijakan, tata kelola, dan infrastruktur. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia; 2019. 135–172

40. **Pamungkas C.** Intoleransi dan radikalisme dalam pertanyaan. Dalam: **Pamungkas C**, Permana YS, editor. Intoleransi dan politik identitas kontemporer di Indonesia. Jakarta: LIPI Press; 2020: 1–20.

Jurnal Internasional

41. **Pamungkas C.** Approaches in Southeast Asian studies: Developing post-colonial theories in Areas Studies. *Suvannabhumi, multidisciplinary journal of Southeast Asian Studies* 2015; 7(1): 59–76.
42. **Pamungkas C.** Social contexts of exclusionary reactions: Study on Muslim and Christian relation in the city of Ambon. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 2015; 5(1): 49–78.
43. **Pamungkas C**, Hakam S. Belt road initiative and the making of Southeast Asian identity. *Suvannabhumi, Multidisciplinary Journal of Southeast Asian* 2019; 11 (2); 2019: 59–83.
44. **Pamungkas C**, Hakam S, Indriasari DT. Between fear and hope: Belt and Road Initiative (BRI) in Southeast Asia. *Chinese Journal of International Review* 2020; 2(1): 1–20.

Jurnal Nasional

45. **Pamungkas C.** Kekerasan terhadap Bangsa Moro. *Jurnal Infoham, Kementerian Kehakiman dan HAM* 2003; 2.
46. **Pamungkas C.** Konflik elit lokal dalam pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat. *Masyarakat Indonesia, Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia (LIPI)* 2004; XXX(1): 15–40.
47. **Pamungkas C.** The Malay-Muslim and Thailand administration. *Jurnal Hermenia* 2005; 4(1): 1–26
48. **Pamungkas C.** Interaksi sosial antarumat beragama di Maluku: Sebelum dan sesudah konflik sosial 1999. *Masyarakat Indonesia, Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia* 2005; XXX(1): 91–101.
49. **Pamungkas C.** Sejarah perjuangan Bangsamoro 1968–2003. *Jurnal Tantular* 2005; 3: 78–91.

50. **Pamungkas C.** Membaca dinamika konflik Poso: Dari kekerasan komunal ke kekerasan politik. *Masyarakat Indonesia, Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia* 2006; XXXII(2): 55–76.
51. **Pamungkas C.** China in global economy and political change. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 2006; XIV(2): 1–32.
52. **Pamungkas C.** Indonesia dan integrasi ekonomi global. *Jurnal Kajian Kebudayaan dan Demokrasi* 2007; 4(II): 39–46.
53. **Pamungkas C.** Pertarungan simbolik dalam Pemilu 2009: Analisis terhadap sistem politik dan politik pencitraan. *Masyarakat Indonesia, Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia* 2009; XXXV(2): 41–70.
54. **Pamungkas C.** PT Freeport Indonesia: Sejarah dan dampaknya terhadap suku Amungme dan Komoro. *Socia jurnal ilmu-ilmu sosial* 2009; 6(Mei): 53–70.
55. **Pamungkas C.** Sumber persoalan keamanan di perbatasan Indonesia dan Timor Leste. *Jurnal Universitas Paramadina* 2009; 6(3): 264–279.
56. **Pamungkas C.** Muslim perempuan di Fak-fak: Kekerasan domestic dan proses perdamaian. *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 2009; 11(2): 217–236.
57. **Pamungkas C.** Agama, etnisitas, dan perubahan politik di Maluku: Refleksi teoretik dan historis. *Masyarakat Indonesia, Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia* 2014; 40(1): 37–56.
58. **Pamungkas C.** Efektivitas pembangunan social ekonomi dan kebijakan afirmatif dalam resolusi konflik Papua. *Noken Jurnal Ilmiah Bahasa, Sastra & Sosial-Budaya* 2014; 3: 324–340.
59. **Pamungkas C.** Hubungan antarkelompok agama di Kaimana dalam perspektif sejarah sosial. *Patrawidya* 2015; 16(1): 1–18.
60. **Pamungkas C.** The history of Muslims and Christians in Papua: Tracing cultural and religious heritage. *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage* 2015; 3(1): 83–106.

61. **Pamungkas C.** Ethnic conflict theory, religiosity, and cultural bond: Approaches combined to resolve religious intolerance in Ambon. *Jurnal Harmoni* 2015; 14(1): 9–25.
62. **Pamungkas C.** Social changes in Yogyakarta. *Jurnal Humaniora* 2015; 27(2): 141–155.
63. **Pamungkas C.** The contestation of Muslims and special autonomy in West Papua. *Jurnal Religio UIN Sunan Ampel Surabaya* 2015; 5(1): 27–49.
64. **Pamungkas C.** Sejarah lisan sejarah integrasi Papua ke Indonesia: Pengalaman subjektif orang Kaimana pada periode Penentuan Pendapat Rakyat 1969. *Paramita* 2015; 25: 88–108.
65. **Pamungkas C.** Global village dan globalisasi dalam konteks Indonesia. *Global & Strategis* 2015; 9(2): 245–261.
66. **Pamungkas C.** The history of the labour movement in South Korea 1947–1997. *Jurnal Sosiologi Masyarakat* 2015; 16(2): 115–140.
67. **Pamungkas C.** Intergroup contact avoidance in Indonesia. *Masyarakat Indonesia, Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia* 2016; 43(2): 249–266.
68. **Pamungkas C.** Social resilience of minority group: Study on Syiah refugees in Sidoarjo and Ahmadiyah refugees in Mataram, *Jurnal Ulumuna* 2016; 19(2): 251–278.
69. **Pamungkas C.** Ethno-religious identification and social distance between Muslims and Christians: Analysis on social identity theory. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* 2016; 6(1): 53–70.
70. **Pamungkas C.** Kontestasi antarorang asli Papua terhadap hak pertuanan di Kaimana. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 2016; 29(2): 75–89.
71. **Pamungkas C.** Muslim Papua dan muslim pendatang: Pertarungan identitas antara ke-Indonesia-an dan ke-Papua-an. *Jurnal Kawistara* 2016; 6(3): 249–264.

72. **Pamungkas C.** Nasionalisme masyarakat perbatasan: Studi kasus orang Sangir di Kabupaten Sangihe. *Jurnal Komunitas* 2016; 8(1): 59–72.
73. **Pamungkas C.** Perbatasan dalam perspektif sosial: Studi perbatasan Indonesia dan Timor Leste. *Jurnal Ledalero* 2016; 15(1): 150–175.
74. **Pamungkas C.** Bringing back the minority through regional autonomy: Case study of West Papua and Mindanao. *Jurnal Komunitas* 2017; 2(2): 121–145.
75. **Pamungkas C.** Noken electoral system in Papua: Deliberative democracy in Papuan tradition. *Jurnal masyarakat dan budaya* 2017; 19(2): 219–236.
76. **Pamungkas C.** The Campaign of Papua Peace Network for Papua peace land. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 2017; 21(2): 147–159.
77. **Pamungkas C, Indriasari DT.** Pemilihan gubernur Papua: Politik identitas, tata kelola pemerintahan, dan ketahanan orang asli Papua. *Jurnal Masyarakat & Budaya* 2018; 20(3): 391–406.
78. **Pamungkas C.** Mencari bentuk rekonsiliasi intra-agama: Analisis terhadap pengungsi Syiah Sampang dan Ahmadiyah Mataram. *Episteme: Jurnal pengembangan ilmu keislaman* 2018; 13(1): 113–147.
79. **Pamungkas C.** Gone but not forgotten: The transformation of the Idea of Islamic State through traditional religious authorities. *Masyarakat, A Sociology Journal* 2018; 23(2): 187–211.
80. **Pamungkas C.** Building social resilience on Asmat people: Social and cultural perspective. *Kapata Arkeologi* 2018; 14(1): 111–122.
81. **Pamungkas C.** Pengelolaan perbatasan dan hubungan antaretnis di Bengkayang. *Jurnal Hubungan Internasional* 2018; 6(2): 124–134.

82. **Pamungkas C**, Putro ZAE. Agama Konghucu dan Buddha dalam lintasan sejarah Korea. *Jurnal Kajian Wilayah* 2018; 8(2): 137–153.
83. **Pamungkas C**. Menelusuri Akar Konflik dan Kebijakan Damai di Tanah Papua. *Antropologi Indonesia* 2019; 40(2): 100–122.

Prosiding Internasional

84. **Pamungkas C**. The 2004 election and student movement in Indonesia. Dalam: Seminar proceeding ‘Reformasi’ the Institute of Liberal Arts; Walailak University, Thailand; 2004: 169–180.
85. **Pamungkas C**. The effectiveness of the Autonomous Region in Muslim Mindanao ARMM) in coping with the separatism and the role of National Reconciliation Commission of Thailand in peace building. Dalam: Are we up to the challenge?: Current crisis and the Asian intellectual community. The work of the 2005/2006 API Fellows. Bangkok: The Nippon Foundation; 2008: 185–195.
86. **Pamungkas C**. Approach in Southeast Asian Studies: Searching hybrid between post-colonial theories and area studies. Dalam: International conference proceeding methodological in quest Southeast Asian studies; 23–25 April 2015; Busan: Busan University of Foreign Studies & National Research Foundation of Korea.
87. **Pamungkas C**. Between Indonesia and West Papua nationalism: Study case of Al-Hamid family in Kaimana of West Papua. Dalam: MS Rohman, AM Sila, NAK Hayaze, AN Burhani, editor. The dynamics of Hadhramis in Indonesia, A Proceeding of an International Conference in Jakarta. Jakarta: PMB-LIPI, MENARA, Balitbang Kementerian Agama RI, dan The Hadhramaut Center for Historical Research Documentation and Publication; 2017. 132–150.

88. **Pamungkas C.** The campaign of the Papua Peace Network (PPN) for peace in Papua. Dalam: Jitpiromsri S, Kooyai K, Haque MM, Changkamol W, Panjor F, Choengsamor N, editor. The International Conference on Political Transition, Non-Violence and Communication in Conflict Transformation; 24–26 Januari 2017; Prince of Songkla University (PSU) Thailand. Pattani: PSU; 2018: 295–318.
89. **Pamungkas, C.** Tracing the root of violence and peace building in Papua. Dalam: Lumenta D, Hudayana B, editor. The use and abuse of diversity: Anthropological responses to the threat of disintegration. Depok: Departemen Antropologi UI; 2020: 211–215.

Prosiding Nasional

90. **Pamungkas C, Sofyan R.** Pemilu 2004 dan rekonsolidasi neo-liberalisme. Dalam: Presiden pilihan Rakyat, so what? Prosiding seminar refleksi akhir 2004. Jakarta: IPSK LIPI; 2005: 130–173.

DAFTAR PUBLIKASI LAINNYA

Working Paper

1. **Pamungkas C.** The Representation of religious identity in Papua: Indonesia-ness and Papua-ness. Working Paper Series the International Indonesia Forum (IIF) 2014; 8: 1–29.

Makalah

2. **Pamungkas C.** Peran strategis gerakan mahasiswa pasca pemilu 2004. Dalam: Seminar politik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas nasional Jakarta (UNJ), 3 September 2004.
3. **Pamungkas C.** Konsolidasi sipil demokratik sebagai pra-syarat pergerakan mewujudkan kedaulatan rakyat. Makalah diskusi panel dalam Rapat Koordinasi Nasional Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI); 26 Agustus 2004; Bangkalan.
4. **Pamungkas C.** Bringing back the national minority through regional autonomy: The case of Southern Philippines and Papua. Makalah pada The Asian Regional Conference of the Philippines Political Science Association (PPSA); 21–22 Oktober 2005; Tagbilaran City, Central Philippines,.
5. **Pamungkas C.** Approaches to national minorities: learning from Indonesia experiences. Makalah pada The Round-Table Discussion, The Institute of Bangsamoro Studies; 14 November 2005; Cotabato City, the Philippines,.
6. **Pamungkas C.** Pemetaan teori kekerasan, konflik, dan rekonsiliasi. Makalah dalam Seminar Nasional Penyelesaian Konflik Sosial; 12 November 2009; Universitas Negeri Malang.
7. **Pamungkas C.** Pasang surut konflik Papua dalam lintasan sejarah Indonesia. Makalah dalam Seminar Refleksi Akhir Tahun Papua; 18 Desember 2014; Pusat Penelitian Politik LIPI.

8. **Pamungkas C.** Mencari jalan damai penyelesaian konflik Papua di masa pemerintahan baru. Makalah dalam workshop ‘Mencari Jalan Damai Penyelesaian Konflik Papua di Masa Pemerintahan Baru’; 4–5 September 2014; Imparsial Jakarta.
9. **Pamungkas C.** The representation of religious identity in Papua: Indonesia-ness and Papua-ness. Makalah dalam the 7th IIF (International Indonesia Forum); 19 Agustus 2014; UIN Sunan Gunung Jati, Bandung.
10. **Pamungkas C.** Ethno-religious identification and support of residential segregation: An empirical study at the individual level among Muslim And Christian students in Indonesia. Makalah dalam Studia Islamika International Conference on “Southeast Asian Islam: Legacy and New Interpretation”; 14–16 Agustus 2014; UIN Syarif hidayatullah, Ciputat, Tangerang Selatan.
11. **Pamungkas C.** Muslim Papua dan Muslim Pendatang: Pertarungan identitas antara Ke-Indonesia-an dan Ke-Papua-an. Makalah dalam Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) XIV; 21–24 November 2014; Balikpapan, Kalimantan Timur,.
12. **Pamungkas C.** Migration, religion and politics: Analysis on Muslim and Christian relation in Kaimana of West Papua. Makalah dalam konferensi internasional The European Association for Southeast Asian Studies (EuroSEAS) ke-8; 11–14 Agustus 2015; Vienna.
13. **Pamungkas C.** Peace building in Papua: Analysis on Papua Peace Network in campaigning dialogue beetwen Jakarta and Papua. Makalah dalam Asia-Pacific Peace Researcher Association (APPR) Conference; 21–24 Oktober 2015; Kathmandu, Nepal,.
14. **Pamungkas C.** Deliberative democracy in Papuan tradition: Analysis on the Noken electoral system. Makalah dalam konferensi internasional Consortium of Indonesia Political Research (CIPR); 25–27 Agustus 2015; Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur.

15. **Pamungkas C.** Spirit kewirausahaan dan paradigma kerja dalam era globalisasi. Makalah dalam kuliah umum STIE NU Pasuruan; 7 Agustus 2016; Jawa Timur.
16. **Pamungkas C.** Pendidikan multikultural dalam suasana kebangsaan pada masa kini. Makalah dalam kuliah umum pendidikan multikultural; 4 November 2017; Departemen Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.
17. **Pamungkas C.** Problematizing peace development project in West Papua after the 1998 reform. Makalah dalam International Consultation for West Papua; 22 Januari 2017; Jenewa, Swiss.
18. **Pamungkas C.** Peta teori ilmu sosial dan posisi ilmu sosial ke-Indonesia-an. Makalah dalam Konferensi Nasional Ilmu Sosial; 4 Mei 2017; Universitas Negeri Yogyakarta.
19. **Pamungkas C.** Can infrastructure based development bring peace to West Papua? Makalah pada konferensi International Peace Research Association (IPRA); 11–12 November 2018; Ahmedabad-India,.
20. **Pamungkas C.** Konflik & ketahanan desa di Indonesia Timur: Studi kasus Negeri Geser, Seram Bagian Timur, Makalah dalam workshop Pustlibang Kementerian Desa, Transmigrasi, Daerah Tertinggal; 25 April 2019; Cirebon.
21. **Pamungkas C.** The Belt Road Initiative in Southeast Asia: challenges and prospects. Kertas kerja dalam Seminar China Institute of International Studies (CIIS); 22 Agustus 2019; China Institute of International Studies (CIIS)- Beijing, People Republic of China.
22. **Pamungkas C.** The development of Areas Studies In Indonesia: From country studies to research on trans-national movement. Makalah dalam konferensi internasional Area studies the 21st Century: Global Experiences and China Paradigm; 12–13 April 2019; Peking University Beijing.

23. **Pamungkas C.** Tracing the root of violence and peace building in Papua. Makalah dalam the 7th International Symposium of Journal Antropologi Indonesia (ISJAI): “The use and abuse of diversity: Anthropological responses to the threat of disintegration”; 23–26 Juli 2019; Yogyakarta.
24. **Pamungkas C.** Preventing religious conflict in West Papua: Study case of Islam and Christian relations in Jayapura of West Papua. Makalah dalam the 2019 Asia-Pacific Peace Research Association Conference; 2–4 Mei 2019; Jakarta.

Policy Brief

25. Elisabeth A, Tebay N, Sumule A, Sudrajat, **Pamungkas C**, Siregar LA, Manufandu S. Policy brief bersama-sama membangun Papua damai. Jakarta: P2P-LIPI & JDP; 2014.
26. Elisabeth A, **Pamungkas C**, Zidni AP, Satriani S. Dialog nasional membangun Papua damai. Jakarta: Tim Kajian Papua-Pusat Penelitian Politik LIPI; 2016.
27. **Pamungkas C**, Mudzakkir, Budiwanti E, Wahyudi, Wahyudhi N. Policy paper perlindungan pengungsi minoritas agama: Komunitas Syiah Sampang dan Ahmadiyah Mataram. Jakarta: Penelitian Unggulan LIPI; 2017.
28. **Pamungkas C**, editor. Kertas kerja membangun narasi positif ke-Indonesia-an. Jakarta: PMB-LIPI; 2018.
29. Elisabeth A, **Pamungkas C**, Budiatri AP, Satriani S. Policy brief menuju Papua yang stabil dan sejahtera. Jakarta: P2P LIPI; 2019.

Tesis dan Disertasi

30. **Pamungkas C.** Papua Islam dan otonomi khusus: Kontestasi identitas di kalangan orang Papua [Tesis]. [Jakarta]: Program Pascasarjana Sosiologi FISIP UI; 2008.
31. **Pamungkas C.** Intergroup contact avoidance in Indonesia [Disertasi]. [Belanda]: Radboud University Nijmegen; 2015.

Monografi Penelitian

32. Budiwanti E, **Pamungkas C**, editor. Penghormatan terhadap hak-hak golongan minoritas agama. Jakarta: Balitbang HAM Kementerian Kehakiman dan HAM RI; 2003.
33. Budiwanti E, **Pamungkas C**, editor. Interaksi sosial antar etnis di daerah konflik horisontal. Jakarta: Balitbang Kementerian Kehakiman dan HAM RI; 2004.
34. Pohan MH, **Pamungkas C**, Jumadi. Kajian exit strategy dan mekanisme transisi pasca berakhirnya efektivitas Peraturan Presiden No 66/2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam melaksanakan Peraturan Presiden No. 65/2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Jakarta: UP4B; 2014.
35. **Pamungkas C**. Membangun narasi positif ke-Indonesia-an dan kebangsaan. Jakarta: Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya LIPI; 2018. Laporan penelitian PN Sumbu Pendek.
36. Soewarsono, **Pamungkas C**, Budiman H, Saidi A. Mendefinisikan ulang multikulturalisme dan nasionalisme di Indonesia: Kajian isu-isu frontier. Jakarta: Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya LIPI; 2017. Laporan penelitian.
37. Sari YI, Elisabeth A, McLeod J, **Pamungkas C**, Haryana RE, Setiawan MA, dkk. Impact of Road Construction on indigenous people in West Papua. Jakarta: LIPI dan The Asia Foundation (TAF); 2018.

Modul

38. Elisabeth A, Budiatri AP, Wisanggeni A, Nurbaiti A, **Pamungkas C**, Gayatri IH, Hardianto JS, Aritonang M, Rita M, Satriani S, Mambor VC, Prasetyo YA. Modul kode perilaku peliputan konflik Papua. Jakarta: LIPI; 2017.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama	: Dr. Cahyo Pamungkas, S.E., M.Si.
Tempat, Tanggal Lahir	: Purworejo, 11 September 1975
Anak ke	: Lima
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Nama Ayah Kandung	: H. Suyoto (alm.)
Nama Ibu Kandung	: Sriyati
Nama Instansi	: Pusat Penelitian Kewilayahan LIPI
Judul Orasi	: Rekonstruksi pendekatan dalam kajian konflik di Asia Tenggara: Kasus Indonesia, Thailand, Filipina, dan Myanmar.
Bidang Kepakaran	: Sosiologi Umum
No. SK Pangkat Terakhir	: 742/Kep/J.3-c/2018
No. SK Peneliti Ahli Utama	: 31/M Tahun 2019

B. Pendidikan Formal

No.	Jenjang	Nama Sekolah/ PT/Universitas	Tempat/Kota/ Negara	Tahun Lulus
1	SD	SD Negeri 1 Wareng, Butuh	Purworejo	1988
2	SMP	SMP Negeri I Grabag	Purworejo	1991
3	SMA	SMA Negeri I Pur- worejo	Purworejo	1994
4	S1	Universitas Gadjah Mada	Yogyakarta	1999
5	S2	Universitas Indonesia	Depok	2008
6	S3	Radboud University Nijmegen	Nijmegen, Belanda	2015

C. Pendidikan Nonformal

No.	Nama Pelatihan/Pendidikan	Tempat/Kota/ Negara	Tahun
1	Prajabatan	Jakarta	2003
2	School of Peace and Conflict Studies	Bangkok, Thailand	2006
3	Diklat Fungsional Peneliti Tingkat Pertama	Jakarta	2007
4	<i>Training of Trainer</i> (ToT) Diklat Fungsional Peneliti	Jakarta	2017
5	Pelatihan Negosiator untuk Kemanusiaan	Bangkok, Thailand	2019

D. Jabatan Struktural

No.	Jabatan/Pekerjaan	Nama Instansi	Tahun
1	Kepala Subbidang Kerja Sama Penelitian	Pusat Penelitian Sumber Daya Regional LIPI	2009

E. Jabatan Fungsional

No.	Jenjang Jabatan	TMT Jabatan
1	Peneliti Madya - IV/a	1 Desember 2009
2	Peneliti Madya - IV/b	1 April 2015
3	Peneliti Madya - IV/c	1 Juli 2017
4	Peneliti Ahli Utama - IV/d	2 Mei 2019

F. Penugasan Khusus Nasional/Internasional

No.	Jabatan/Pekerjaan	Pemberi Tugas	Tahun
1.	Kajian Penghormatan terhadap Hak-hak Golongan Minoritas Agama.	Balitbang HAM, Kemenkumham	2003
2.	Kajian Implementasi Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya Barat	LIPI dan Kemendagri	2003
3.	Kajian Interaksi Sosial Antaretnis di Daerah Konflik Horizontal	Balitbang HAM, Kemenkumham	2004
4.	Asian Public Intellectual Fellowships	The Nippon Foundation	2005–2006
5.	Kajian Reformasi Penataan Daerah	Democratic Reform Support Program (DRSP)	2007
6.	Penelitian Papua Islam dan Otonomi Khusus	Friedrich Ebert Stiftung & UI	2008

No.	Jabatan/Pekerjaan	Pemberi Tugas	Tahun
7.	Penelitian Sejarah Pemerintahan dan Masyarakat Kaimana	Pemerintah Kabupaten Kaimana	2008–2009
8.	Penelitian Kekerasan Domestik terhadap Perempuan Papua	Asian Muslim and Action Network	2009
9.	Penelitian Konflik Laten Antarkelompok Etnis dan Agama di Ambon dan Yogyakarta	Radboud University Nijmegen	2010–2015
10.	Kajian <i>Exit Strategy</i> dan Mekanisme Transisi Pasca-Berakhirnya Perpres No. 65 dan 66/2011	Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B)	2014
11.	Kajian Pengelolaan Perbatasan Negara	LIPI	2014–2015
12.	Kajian <i>Global Village</i>	LIPI	2014–2017
13.	Penelitian <i>Updating Papua Road Map</i>	Yayasan TIFA dan LIPI	2015–2016
14.	Koordinator Penelitian Unggulan Ketahanan Sosial Minoritas Keagamaan	LIPI	2015–2017
15.	Penelitian Dampak Infrastruktur terhadap Orang Asli Papua	The Asia Foundation (TAF) Jakarta	2018
16.	Penelitian Jaringan Perdagangan Seram Timur dan Papua Barat	Populi Center	2018
17.	Koordinator Tim Penelitian Prioritas Nasional Intoleransi dan Radikalisme	LIPI	2018

Buku ini tidak diperjualbelikan.

No.	Jabatan/Pekerjaan	Pemberi Tugas	Tahun
18.	Penelitian Prioritas Nasional Pendidikan, Kesehatan, dan Perubahan Sosial Demografi di Papua	LIPI	2019
19.	Kajian <i>Belt and Road Initiative</i> di Asia Tenggara	China Institute of International Studies (CIIS)	2019
20.	Penelitian Pembangunan, Marginalisasi, dan Disintegrasi di Tanah Papua	Yayasan TIFA dan Imparsial	2020
21.	Penilai dan <i>Reviewer</i> Proposal Penelitian	Pusat Penelitian Kebijakan, Kemendikbud	2020

G. Keikutsertaan dalam Kegiatan Ilmiah

No.	Nama Kegiatan, Tempat	Peran/Tugas	Tahun
1	Seminar refleksi akhir tahun IPSK LIPI, ‘Presiden Pilihan Rakyat, So What?’ Jakarta.	Penulis makalah	2005
2	Konferensi Internasional the Philippines Political Science Association (PPSA), Tagbilaran City, Filipina	Pembicara	2005
3	Workshop the Institute of Bangsamoro Studies, Cotabato City, Filipina	Pembicara	2005
4	Konferensi Internasional Asian Public Intellectual Fellow, Are We up to the Challenge?: Current Crisis and the Asian Intellectual Community, Phuket, Thailand	Pembicara	2006
5	Seminar Internasional Dinamika Politik Lokal di Indonesia ke-8, ‘Penataan Daerah dan Dinamikanya’, Salatiga	Pembicara	2007

No.	Nama Kegiatan, Tempat	Peran/Tugas	Tahun
6	Seminar Dinamika Politik Lokal di Indonesia ke-10, ‘Representasi Kepentingan Rakyat pada Pemilu Legislatif 2009’, Salatiga	Pembicara	2009
7	Seminar Nasional Penyelesaian Konflik Sosial di UNM, Malang	Pembicara	2009
8	Seminar Internasional Dinamika Politik Lokal di Indonesia ke-12, ‘Seputar Permasalahan Keamanan dan Perlindungan Sosial di Aras Lokal di Indonesia’, Salatiga	Pembicara	2011
9	Konferensi Internasional Asia Pacific Peace Research Association (APPRA), Bangkok, Thailand.	Pembicara	2013
10	Konferensi Internasional ke-7 the International Indonesia Forum (IIEF) ‘Representing Indonesia’, Bandung	Pembicara	2014
11	Seminar Refleksi Akhir Tahun “Kajian Papua 2014, Sejarah Papua dalam Tinjauan Akademik”	Pembicara	2014
12	Workshop Forum Akademisi untuk Papua Damai ‘Mencari Jalan Damai Penyelesaian Konflik Papua di Masa Pemerintahan Baru, Jakarta	Pembicara	2014
13	Konferensi Internasional Studia Islamika, ‘Southeast Asian Islam: Legacy and New Interpretation, Jakarta	Pembicara	2014
14	Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) XIV, Balikpapan	Pembicara	2014
15	Workshop Internasional ‘Ethnoreligious Conflict in Indonesia and the Philippines’, UGM, Yogyakarta	Pembicara	2014

Buku ini tidak diperjualbelikan.

No.	Nama Kegiatan, Tempat	Peran/Tugas	Tahun
16	Konferensi International Coalition for West Papua, Brussels, Belgia	Pembicara	2015
17	Konferensi Internasional the European Association for Southeast Asian Studies (EuroSEAS) ke-8, Vienna, Austria	Pembicara	2015
18	Konferensi Internasional Asia Pacific Peace Researcher Association (APPR), Kathmandu, Nepal	Pembicara	2015
19	Konferensi Internasional Methodological in Quest Southeast Asian Studies, Busan, Korea Selatan	Pembicara	2015
20	Konferensi Internasional Indonesia Forum, “Modern and Traditional Meaning of Territorial Border,” Surakarta	Pembicara	2015
21	Konferensi Internasional Consortium of Indonesia Political Research (CIPR), Malang	Pembicara	2015
22	Seminar nasional peluncuran buku Updating Papua Road Map: Proses Perdamaian, Politik Kaum Muda dan Diaspora Papua, Jakarta	Pembicara	2016
23	Konferensi Internasional ‘The Dynamics of Hadhramis in Indonesia’, Jakarta	Pembicara	2017
24	Konferensi Internasional ‘Political Transition, Non-Violence and Communication in Conflict Transformation,’ Pattani, Thailand	Pembicara	2017
25	Kuliah Umum Pendidikan Multikultural Dep. Sosiologi dan Antropologi FIS-UNS, Surakarta	Pembicara	2017

No.	Nama Kegiatan, Tempat	Peran/Tugas	Tahun
26	Konferensi Nasional Ilmu Sosial, UNY, Yogyakarta	Pembicara	2017
27	Dialog Kebangsaan UNESA, 'Peran Mahasiswa dalam Merajut Kebhinekaan,' Surabaya	Pembicara	2017
28	Seminar Internasional pada Kongres Dewan Gereja se-Dunia, Geneva, Swiss	Pembicara	2017
29	Konferensi International Peace Research Association (IPRA), Ahmedabad, India	Pembicara	2018
30	Seminar nasional 'Peran Media Sosial dalam Penyebaran Intoleransi dan Radikalisme', Unhan, Bogor	Pembicara	2018
31	Kuliah umum 'Kampus dan Multikulturalisme dalam Konteks Sosial dan Budaya Masyarakat Maluku', IAIN Ambon	Pembicara	2018
32	Seminar Peluncuran Naskah Akademik Pendekatan Resolusi Konflik Papua, FAPD, Bandung	Pembicara	2018
33	Konferensi Internasional 'Indo Pacific and Beyond', FISIP UKI	Pembicara	2019
34	Konferensi International Coalition for West Papua, 'Indonesia After Election.' Berlin, Jerman	Pembicara	2019
35	Workshop Pustlibang Kementrian Desa, Transmigrasi, Daerah Tertinggal, Cirebon	Pembicara	2019
36	Simposium Jurnal Antropologi Indonesia, 'The Use and Abuse of Diversity: Anthropological Responses to the Threat of Disintegration,' UGM Yogyakarta	Pembicara	2019

Buku ini tidak diperjualbelikan.

No.	Nama Kegiatan, Tempat	Peran/Tugas	Tahun
37	Konferensi internasional ‘Area studies the 21 st Century: Global Experiences and China Paradigm,’ Peking University, Beijing.	Pembicara	2019
38	Konferensi Internasional Asia-Pacific Peace Research Association (APPRA), Jakarta	Pembicara	2019
39	Kuliah umum Hubungan Internasional di Asia Pasifik, UKI Jakarta	Pembicara	2019

H. Keterlibatan dalam Pengelolaan Jurnal Ilmiah

No.	Nama Jurnal/Prosiding	Peran/ Tugas	Tahun
1	Jurnal Kajian Wilayah	Editor	Sejak 2014
2	Jurnal Masyarakat Indonesia	Editor	Sejak 2014
3	Jurnal Masyarakat dan Budaya	Reviewer	Sejak 2018
4	Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities	Reviewer	Sejak 2019
5	Jurnal Kebudayaan	Reviewer	Sejak 2019
6	Jurnal Religio	Reviewer	Sejak 2019
7	Jurnal Hubungan Internasional	Reviewer	2020

I. Karya Tulis Ilmiah

No.	Kualifikasi Penulis	Jumlah
1	Penulis Tunggal	77
2	Bersama Penulis lainnya	13
	Total	90

No.	Kualifikasi Bahasa	Jumlah
1	Bahasa Indonesia	56
2	Bahasa Inggris	34
	Total	90

J. Pembinaan Kader Ilmiah

Pejabat Fungsional Peneliti

No.	Nama	Instansi	Peran/Tugas	Tahun
1.	Wabilia Husna	P2W LIPI	Pembimbing	2016
2.	Mardoni	Bappeda Sumbar	Pembimbing	2017
3.	Pramusinta Arumsari	Bappeda Kalbar	Pembimbing	2017
4.	Romasta Napitupulu	Bappeda Kab. Musi Rawas	Pembimbing	2017
5.	Wahyu Dedi Rahman	Bappeda Kab. Musi Rawas	Pembimbing	2017
6.	Febrianida Sasmita	Bappeda Kota Sungai Penuh	Pembimbing	2017
7.	Zaka Firma Aditya	Mahkamah Konstitusi	Pembimbing	2018
8.	Rizkisyabana Yulistyaputri	Mahkamah Konstitusi	Pembimbing	2018
9.	Abdul Basid Fuadi	Mahkamah Konstitusi	Pembimbing	2018
10.	Muhammad Reza Winata	Mahkamah Konstitusi	Pembimbing	2018
11.	Sharfina Sabila	Mahkamah Konstitusi	Pembimbing	2018
12.	Mery Christian Putri	Mahkamah Konstitusi	Pembimbing	2018
13.	Erlina MC Sinaga	Mahkamah Konstitusi	Pembimbing	2018
14.	Wahyu Utomo	BKKBN	Pembimbing	2018
15.	Indrawan Cahyadi	Kementerian Agama	Pembimbing	2018
16.	Marwandianto	Kemenkumham	Pembimbing	2018
17.	Irsyad Zamjami	Kemendikbud	Pembimbing	2018

No.	Nama	Instansi	Peran/Tugas	Tahun
18.	Otto Trengginas Setiawan	Setjen. MPR	Pembimbing	2018
19.	Rike Novianti	Bappeda Kab. Bekasi	Pembimbing	2018
20.	Dede Abdul Halim	Bappeda Kab. Bekasi	Pembimbing	2018
21.	Lestya Aqmarina	Kemenpar	Pembimbing	2018
22.	Giska Hadiyanti	Bappeda Kalbar	Pembimbing	2018
23.	Dasril Hasan	Bappeda Kota Solok	Pembimbing	2018
24.	Nyoman Arisanti	Balai Arkeologi Bali	Pembimbing	2018
25.	Arie Januar	BPNB Papua	Pembimbing	2018
26.	Muhammad Jundullah Dzia Ulhaq	BPNB Papua	Pembimbing	2018
27.	Rusman Nurjaman	LAN	Pembimbing	2018
28.	Bayu Indra Permana	Mahkamah Agung	Pembimbing	2018

Mahasiswa (Program by Research LIPI)

No.	Nama Bimbingan	PT/Universitas	Tahun Lulus
1	Wabilia Husna (S2)	Universitas Indonesia	-
2	Rita Pawestri (S3)	Universitas Indonesia	-
3	Septi Satriani (S3)	Universitas Indonesia	-

K. Organisasi Profesi Ilmiah

No.	Jabatan	Nama Organisasi	Tahun
1	Anggota	Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo), DKI Jakarta	Sejak 2019
2	Anggota	Asia-Pacific Peace Research Association (APPRA)	Sejak 2013
3	Anggota	International Peace Research Association (IPRA)	Sejak 2018
4	Anggota	Forum Akademisi untuk Papua Damai (FAPD)	Sejak 2018

L. Tanda Penghargaan

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Satyalencana Karya Satya X	Presiden RI	2014



LIPI Press

Gedung PDDI LIPI, Lantai 6
Jln. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta 12710
Telp. (+62 21) 573 3465
E-mail: press@mail.lipi.go.id
Website: lipipress.lipi.go.id

ISBN 978-602-496-144-2



Buku ini tidak diperjualbelikan.